

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,
INFLASI, UPAH MINIMUM, DAN TINGKAT
PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT
PENGANGGURAN DI PULAU SUMATERA**



SKRIPSI

**OLEH
EFENDI
C1A017030**

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
2021**

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,
INFLASI, UPAH MINIMUM, DAN TINGKAT
PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT
PENGANGGURAN DI PULAU SUMATERA**



SKRIPSI


Diajukan Kepada Universitas Bengkulu
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ekonomi

**OLEH
EFENDI
C1A017030**

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
2021**

**Skripsi Oleh Efendi ini
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji**

**Bengkulu, 10 Agustus 2021
Pembimbing,**



**Barika, SE.,M.Si
NIP. 19780911 200912 2 003**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan**



**Dr.M. Armelly, SE.,M.Si
NIP. 19650325 199001 2 001**

Bengkulu, 12 Agustus 2021

Skripsi oleh Efendi

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada hari Kamis, 12 Agustus 2021

Dewan Penguji

Ketua

Barika, SE., M.Si
NIP. 19780911 200912 2 003

Sekretaris

Ratu Eva Febriani, SE., M.Sc
NIP. 19840203 200812 2 003

Anggota I

Dr. Muhammad Rusdi, SE., M.Si
NIP. 19621125 198803 1 002

Anggota II

Azansyah, S.E., M.Si
NIP. 19780828 200501 1 006

Mengetahui,
a.n Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Fachruzzaman, S.E., MDM.Ak.CA, Asean CPA
NIP. 19710313 19960 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui (QS. Al-Baqarah: 216).

Persembahan

Dalam penyelesaian skripsi ini banyak suka maupun duka yang terjadi, sehingga saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas terselesaikannya skripsi ini, dan tak lupa ucapan terimakasih kepada orang-orang luar biasa yang selalu ada membantu saya, dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Teruntuk kedua orang tuaku yang selalu mendoakan, menyayangi, menyemangati dan juga selalu berjuang untuk anak-anaknya. Aku bersyukur memiliki Bapak dan Mak yang selalu membimbing dan menasehati anaknya agar menjadi anak yang sukses, terima kasih untuk Bak dan Mak sehingga Efendi bisa sampai ke titik ini.
2. Untuk Kakak dan Adik-adikku yang aku sayangi bang Yadi, dan adikku Riswandi & Ikhsandi yang selalu memberi semangat serta mendoakanku untuk bisa menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga skripsi ini menjadi motivasi dan jalan untuk keluarga kita yang lebih baik.
3. Untuk Kajong dan Tamong yang aku sayangi, terima kasih telah mendoakan, mendukung, dan menasihati Efendi selama ini.
4. Untuk dosen pembimbingku Ibu Barika, SE.,M.Si terima kasih telah membimbing Efendi dalam menyelesaikan tulisan ini.
5. Untuk dosen pengujiku (Ibu Ratu, Pak Rusdi, dan Pak Azan) terima kasih atas saran dan masukannya dalam mengerjakan tulisan ini.
6. Untuk sahabat-sahabat lekku yaitu lek Madison, lek Paul, lek Rizal, lek Ricky, lek Julio dan lekku semuanya yang pernah ada disaat susah maupun senang.

7. Untuk kawan-kawanku kelas Finger A yang aku cintai, terima kasih telah bersama-sama selama ini dari semester 2 hingga sekarang.
8. Untuk Mbak Dea terima kasih atas bantuannya baik dari saran, materi maupun sebagainya.
9. Untuk Aristho fans Arsenal terima kasih telah membantu dalam segi informasi perkuliahan ini.
10. Untuk Mas Erfan terima kasih telah membantu selama ini.
11. Untuk kakak dan adik-adikku yang ada di Ikassaibetik.
12. Untuk penghuni Kostan Ceria terima kasih atas kebersamaannya.
13. Untuk geng gadis di EP (Rendang, Vevita, Nadia, dan Afrini).
14. Untuk kawan-kawanku semuanya di Ekonomi Pembangunan angkatan 2017.
15. Untuk Ekonomi Pembangunan 2017 terima atas pengalamannya selama masa perkuliahan.
16. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan kepada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik disengaja ataupun tidak. Dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Bengkulu batal saya terima.

Bengkulu, 04 Agustus 2021



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Efendi', written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the postage stamp.

Efendi

Analysis of The Effects of Economic Growth, Inflation, Minimum Wages and Education Levels On the Unemployment Rate in The Sumatera Island

Efendi¹⁾

Barika²⁾

Abstract

This study aims to analyze the effects of economic growth, inflation, minimum wages, and education levels on the unemployment rate in the Sumatera island. This type of research is an explanatory research, where the analytical tool used is panel data regression analysis. The results of this study found that the variables of economic growth and education levels had a negative and significant effect on the open unemployment rate in the Sumatera island. Meanwhile, the variable of minimum wages had positive and significant effect on the unemployment rate in the Sumatera island. And the variable of inflation had no effect on the unemployment rate in the Sumatera island.

Keywords: Economic Growth, Education Levels, Inflation, Minimum wages, Unemployment rate

1) Student

2) Supervisor

Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah Minimum, dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Sumatera

Efendi¹⁾

Barika²⁾

RINGKASAN

Pengangguran sampai saat ini masih menjadi suatu permasalahan yang cukup klasik yang sering ditemui dalam pembangunan ekonomi daerah, termasuk di Pulau Sumatera. Masalah pengangguran tentu dapat menimbulkan beberapa efek buruk bagi kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah, seperti bertambahnya angka kemiskinan dan efek buruk lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera. Jenis penelitian ini merupakan explanatory research, dimana metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Total unit observasi data panel dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 90 unit observasi terdiri dari sepuluh provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2011-2019.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum, dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera. Namun, secara parsial inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera. Sedangkan, upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera.

Berdasarkan hal tersebut maka disarankan kepada pemerintah di masing-masing provinsi di Pulau Sumatera untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam upaya meningkatkan daya serap tenaga kerja. Disarankan juga kepada pemerintah di Pulau Sumatera untuk terus meningkatkan sumber daya manusia di Pulau Sumatera melalui pendidikan, sehingga nantinya dengan adanya tingkat pendidikan tinggi dari angkatan kerja, maka kesempatan kerja yang dimiliki angkatan kerja juga akan semakin besar, adanya kesempatan kerja yang semakin besar tersebut akan mendorong peluang terjadinya pengangguran juga akan semakin kecil. Disarankan untuk penetapan upah minimum provinsi harus lebih memperhatikan kondisi dari para pekerja dan pengusaha, sehingga penetapan upah minimum terlalu rendah tidak mengurangi kesejahteraan bagi pekerja dan upah minimum terlalu tinggi juga tidak membebani bagi perusahaan.

Kata Kunci : Inflasi, Pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi

1) Mahasiswa

2) Dosen Pembimbing

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah Minimum, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Di Pulau Sumatera” dengan lancar. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Ibu Barika, SE.,M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Ibu Ratu Eva Febriani, SE.,M.Sc selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Faktulas Ekonomi & Bisnis Universitas Bengkulu dan juga selaku dosen penguji Skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Rusdi SE.,M.Si dan bapak Azansyah SE.,M.Si selaku dosen penguji Skripsi ini.
4. Orang tua saya yang telah memberikan doa serta dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Teman-teman Ekonomi Pembangunan angkatan 2017 yang saya cintai.

Peneliti menyadari bahwa dalam pengerjaan tugas akhir Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, maka dari itu peneliti mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari pihak mana pun, semoga skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bengkulu, Juli 2021
Penulis

Efendi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
LEMPAR PERSETUJUAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Ruang Lingkup.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Pengangguran.....	12
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	19
2.1.3 Inflasi	22
2.1.4 Upah Minimum.....	26
2.1.5 Tingkat Pendidikan	30
2.2 Penelitian Terdahulu	33
2.3 Rerangka Analisis	36
2.5 Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Definisi Operasional	37
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	39
3.5 Metode Analisis	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	47
4.1.1 Deskripsi Data.....	47
4.1.2 Hasil Perhitungan dan Interpretasi Data	57
4.2 Pembahasan.....	65
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	75
5.3 Keterbatasan Dan Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya	76
5.3.1 Keterbatasan Penelitian.....	76
5.3.2 Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya.....	77
Daftar Pustaka	79
Lampiran	82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan tingkat pengangguran terbuka menurut pulau besar di Indonesia periode 2015-2019 (persen)	3
Tabel 1.2 Perkembangan tingkat pengangguran menurut provinsi terbuka di Pulau Sumatera periode 2014-2019 (persen)	4
Tabel 1.3 Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum provinsi, dan tingkat pendidikan di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera tahun 2019	6
Tabel 4.1 Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera periode 2011-2019 (persen)	49
Tabel 4.2 Laju pertumbuhan ekonomi (PDRB Adhk 2010) menurut provinsi di Pulau Sumatera periode 2011-2019 (Persen)	51
Tabel 4.3 Laju Inflasi umum (Yoy) di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera periode 2011-2019 (persen)	53
Tabel 4.4 Perkembangan upah minimum provinsi (UMP) sepuluh provinsi di Pulau Sumatera periode 2011-2019 (ribu Rupiah)	55
Tabel 4.5 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera periode 2011-2019 (persen)	56
Tabel 4.6 Uji Chow (Chow Test) dengan Redundant Test	58
Tabel 4.7 Uji Hausman (Hausman Test)	59
Tabel 4.8 Fixed Effect Model (FEM)	59
Tabel 4.9 Perkembangan harga BBM (premium) di Pulau Sumatera	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Hukum Okun.....	21
Gambar 2.4 Kurva Philips	25
Gambar 2.5 Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja	29
Gambar 2.6 Rerangka Analisis	36
Gambar 4.1 Peta Pulau Sumatera	47
Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Sumatera Menurut Umur tahun 2019.....	58
Gambar 4.3 Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Sumatera Menurut Sektor.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Uji Regresi.....	82
Lampiran 2	Jumlah Penduduk Sumatera Menurut Kelompok Umur.....	84
Lampiran 3	Uji Chow.....	85
Lampiran 4	Uji Hausman	86
Lampiran 5	Common Effect Model	87
Lampiran 6	Fixed Effect Model	88
Lampiran 7	Random Effect Model.....	89

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang dengan total penduduk terbanyak urutan ke empat di dunia setelah China, India dan Amerika. Menurut data sensus penduduk, pada tahun 2020 jumlah penduduk di Indonesia berjumlah sekitar 270,20 juta penduduk, yang mana total penduduk tersebut terdiri dari laki-laki sebesar 136,66 juta dan perempuan 133,54 juta penduduk. Keadaan total penduduk yang begitu banyak dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi negara Indonesia salah satunya yaitu bonus demografi.

Wisnumurti, dkk (2018) menyatakan pada tahun 2020 sampai 2030 Indonesia diprediksi akan menghadapi terjadinya bonus demografi, diperkirakan sekitar 180 juta penduduk akan masuk ke dalam penduduk usia produktif, sementara 80 juta penduduk masuk ke dalam penduduk usia tidak produktif. Dengan adanya jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif tentu hal ini dapat menjadi keuntungan sendiri bagi negara Indonesia.

Dalam menghadapi terjadinya bonus demografi diharapkan pemerintah Indonesia mampu mempersiapkan lapangan pekerjaan baru dan sumberdaya manusia yang berkualitas baik melalui pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan investasi. Namun, jika pemerintah dan masyarakat Indonesia belum mampu menghadapi terjadinya bonus demografi maka hal ini akan menimbulkan berbagai macam masalah, seperti meledaknya angka pengangguran.

Pengangguran merupakan suatu permasalahan dalam bidang ekonomi yang kerap kali ditemui di setiap negara manapun, termasuk di Indonesia. Berdasarkan pada hasil publikasi Badan Pusat Statistik perkembangan tingkat pengangguran di Indonesia selama kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2015 sampai 2019 rata-rata sebesar 5,56 persen. Pada dasarnya pengangguran terjadi disebabkan perbandingan jumlah angkatan kerja yang lebih banyak dibandingkan jumlah lapangan kerja yang tersedia, sehingga lapangan kerja belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja dan pada akhirnya angkatan kerja yang tidak terserap menjadi pengangguran.

Dalam hal ini masalah pengangguran menjadi suatu permasalahan yang cukup serius dan harus segera di atasi pasalnya pengangguran tentu dapat menimbulkan beberapa efek buruk bagi kehidupan masyarakat dan perekonomian negara/daerah, seperti bertambahnya angka kemiskinan, terjadinya kesenjangan sosial, pendapatan masyarakat menurun dan efek buruk lainnya. Kondisi tersebut juga sejalan dari hasil sebuah penelitian di Negara Nigeria, dimana kenaikan tingkat pengangguran akan menyebabkan tingkat kemiskinan ikut naik (Siyani, dkk, 2017).

Di Indonesia masalah pengangguran hampir terjadi di setiap daerah baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pulau Sumatera merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sampai saat ini masih menghadapi masalah pengangguran bahkan pada tahun 2019 sebanyak 1.449.832 penduduk di Pulau Sumatera masuk ke dalam pengangguran terbuka.

Tabel 1.1 Perkembangan tingkat pengangguran terbuka menurut pulau besar di Indonesia periode 2015-2019 (persen)

Pulau	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Pulau Sumatera	6.54	5.43	5.2	5.11	5.04	5.46
Pulau Jawa	6.46	6.05	6.11	5.85	5.77	6.05
Pulau Kalimantan	5.49	5.51	5.04	4.7	4.61	5.07
Pulau Sulawesi	5.73	4.21	4.94	4.45	4.24	4.71
Pulau Papua	4.77	4.18	4.18	3.67	4.09	4.18

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera memiliki angka tingkat pengangguran terbuka tertinggi kedua jika dibandingkan dengan pulau besar lainnya. Hal ini dibuktikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2015 sampai 2019 rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera sebesar 5,46 persen dan bahkan pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera menduduki peringkat pertama dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,54 persen.

Permasalahan pengangguran di Pulau Sumatera merupakan permasalahan yang cukup kompleks, pasalnya Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau penting yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembangunan perkebunan di Indonesia khususnya perkebunan tanaman tahunan. Sebagai gambaran beberapa komoditas penting, antara lain kelapa sawit 7,1 juta ha, karet 2,56 juta ha, kelapa 1,14 juta ha, kopi 774,7 ribu ha, tebu 148 ribu ha, teh 156 ribu ha, dan tembakau 5,700 ha banyak dihasilkan di Pulau Sumatera, hingga menghantarkan Indonesia ke level *global market*. Potensi kekayaan alam yang melimpah di Pulau Sumatera dapat menjadi sebagai salah satu pilar besar bagi perekonomian di Pulau

Sumatera, sebab keunggulan yang dimiliki dalam sektor agraris umumnya dapat meningkatkan pendapatan petani memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan serta dapat menjadi basis bagi pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Seperti yang kita ketahui juga pada tahun 2019 sebanyak 2.841.077 atau 22 persen pekerja di Pulau Sumatera bekerja di sektor pertanian (Badan Pusat Statistik, 2020). Jika melihat hal itu seharusnya kesempatan kerja di pulau Sumatera luas, masyarakat makmur dan sejahtera namun nyatanya tidak, masih banyak masyarakat di Pulau Sumatera yang belum mendapatkan pekerjaan dan bahkan menurut laporan Badan Pusat Statistik angka pengangguran terbuka di pulau Sumatera merupakan tertinggi kedua diantara pulau besar lainnya di Indonesia. Hal ini memberikan indikasi bahwa meskipun Pulau Sumatera memiliki keunggulan sektor agraris tetapi belum sepenuhnya berdampak secara efektif dalam mengurangi angka pengangguran terbuka.

Tabel 1.2 Perkembangan tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi di Pulau Sumatera periode 2014-2019 (persen)

Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	9.02	9.93	7.57	6.57	6.34	6.17
Sumatera Utara	6.23	6.71	5.84	5.6	5.55	5.39
Sumatera Barat	6.5	6.89	5.09	5.58	5.66	5.38
Riau	6.56	7.83	7.43	6.22	5.98	5.76
Kep. Riau	6.69	6.2	7.69	7.16	8.04	7.5
Jambi	5.08	4.34	4	3.87	3.73	4.06
Sumatera Selatan	4.96	6.07	4.31	4.39	4.27	4.53
Bengkulu	3.47	4.91	3.3	3.74	3.35	3.26
Lampung	4.79	5.14	4.62	4.33	4.04	4.03
Kep. Bangka B	5.14	6.29	2.6	3.78	3.61	3.58

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Pada Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan tingkat pengangguran terbuka di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2014-2019. Pada tahun 2014 tingkat pengangguran tertinggi yaitu di Provinsi Aceh sebesar 9,02 persen dan terendah yaitu di Provinsi Bengkulu sebesar 3,47 persen. Sementara itu, pada tahun 2019 tingkat pengangguran tertinggi yaitu di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 7,5 persen, selanjutnya diikuti Provinsi Aceh sebesar 6,17 persen, Provinsi Riau sebesar 5,76 persen, Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,39 persen, Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,38 persen, Provinsi Sumatera Selatan sebesar 4,53 persen, Provinsi Lampung sebesar 4,03 persen, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,58 persen, dan terakhir Provinsi Bengkulu sebesar 3,26 persen.

Tinggi rendahnya tingkat pengangguran di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera serta naik turunnya, tentu banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor, seperti Pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum provinsi, dan tingkat pendidikan yang diduga dapat mempengaruhi tingkat pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran pada suatu daerah. Menurut hukum Okun tingkat pengangguran dan GDP riil memiliki hubungan keterkaitan yang erat, dimana hubungan tersebut berslope negatif antara tingkat pengangguran dan GDP riil (Mankiw, 2003). Artinya, jika terjadi kenaikan pada pertumbuhan ekonomi maka tingkat pengangguran akan berkurang, namun sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka hal tersebut dapat mendorong naiknya tingkat pengangguran. Hal ini juga sejalan hasil penelitian (Soylu, dkk, 2018), di mana koefisien PDB sebesar -0,089 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Negara-negara Eropa Timur.

Tabel 1.3 Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum provinsi, dan tingkat pendidikan di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera tahun 2019

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Inflasi (%)	UMP (Rp)	RLS (Tahun)
Aceh	4.15	1.38	2,935,985	9.18
Sumatera Utara	5.22	2.46	2,303,403	9.45
Sumatera Barat	5.05	1.73	2,289,228	8.92
Riau	2.84	2.56	2,662,025	9.03
Jambi	4.4	1.27	2,423,889	8.45
Sumatera Selatan	5.71	2.05	2,804,453	8.18
Bengkulu	4.96	2.88	2,040,407	8.73
Lampung	5.27	3.48	2,241,269	7.92
Kep. Bangka Belitung	3.32	2.32	2,976,705	7.98
Kep. Riau	4.89	2.4	2,769,754	9.99

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Tabel 1.3 menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera pada tahun 2019. Dilihat dari data tersebut bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera tahun 2019 secara rata-rata yaitu sebesar 4,58 persen. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera yaitu di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,71 persen, selanjutnya diikuti Provinsi Lampung dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,27 persen, Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,22 persen, Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,05 persen, Provinsi Bengkulu sebesar 4,96 persen, Provinsi Kepulauan Riau sebesar 4,89 persen, Provinsi Jambi sebesar 4,4 persen, Provinsi Aceh sebesar 4,15 persen, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,32 persen, dan terakhir Provinsi Kepulauan Riau dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,84 persen.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi dapat menjadi tolak ukur dalam perkembangan pembangunan ekonomi pada suatu daerah. Dengan naiknya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah yang di ukur melalui pertumbuhan PDRB, diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, sehingga angkatan kerja yang ada dapat terserap dan secara langsung dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada.

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran pada suatu daerah. Kenaikan inflasi yang disebabkan terjadinya kenaikan pada permintaan agregat akan menyebabkan permintaan tenaga kerja bertambah. Sehingga ketika permintaan tenaga kerja bertambah akibat dari naiknya permintaan agregat, maka jumlah pengangguran akan berkurang.

Tabel 1.3 menunjukkan laju inflasi di Pulau Sumatera pada tahun 2019. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa inflasi di Pulau Sumatera masih tergolong inflasi ringan, di mana inflasi di Pulau Sumatera masih berada di bawah 10 persen dan bahkan pada tahun 2019 rata-rata inflasi di Pulau Sumatera hanya sebesar 2,25 persen. Pada tahun 2019 inflasi tertinggi di Pulau Sumatera yakni di Provinsi Lampung sebesar 3,48 persen, dan diikuti Provinsi Bengkulu sebesar 2,88 persen. Sementara itu, inflasi terendah yakni di Provinsi Jambi sebesar 1,27 persen.

Dalam teori A.W Philips menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran yang mana didasari atas asumsi bahwa kenaikan dari inflasi merupakan gambaran dari naiknya permintaan agregat. ketika inflasi (harga) naik yang diakibatkan dari naiknya permintaan agregat, maka produsen akan meningkat kapasitas produksi guna untuk memenuhi

permintaan di pasar. Untuk meningkatkan kapasitas produksi maka produsen akan menambah jumlah faktor produksi. Tenaga kerja adalah salah faktor produksi tersebut, ketika produsen menambah jumlah tenaga kerja maka hal ini akan meningkat permintaan tenaga kerja sehingga dapat dikatakan bahwa terjadinya kenaikan pada inflasi dapat mengurangi tingkat pengangguran. Hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran juga didukung dengan hasil penelitian (Macharia & Otieno, 2015), dimana tingkat inflasi memiliki pengaruh yang signifikan dan berslope negatif terhadap tingkat pengangguran di Kenya baik pada jangka pendek maupun pada jangka panjang.

Adapun upah juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Menurut Kaufman dan Hotchkiss (1999) menjelaskan bahwa naiknya tingkat upah akan berpengaruh terhadap turunnya permintaan tenaga kerja. Dengan adanya kenaikan upah maka biaya produksi yang di keluar oleh perusahaan bakal bertambah, sehingga perusahaan akan mengurangi biaya produksi dengan cara melakukan pengurangan pada jumlah tenaga kerja yang digunakan. Jika permintaan tenaga kerja turun maka hal tersebut akan menyebabkan tingkat pengangguran naik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Gorry, 2013), di mana Kenaikan upah minimum antara tahun 2007 dan 2009 di Prancis dapat menyebabkan peningkatan 0,8 persen tingkat pengangguran.

Tabel 1.3 menunjukkan perkembangan upah minimum provinsi di Pulau Sumatera, di mana dalam tabel tersebut dapat kita lihat bahwa upah minimum provinsi di Pulau Sumatera secara rata-rata yaitu di atas Rp 2 juta per bulan. Tercatat bahwa Provinsi Kepulauan Bangka memiliki upah minimum provinsi paling tinggi bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera pada

tahun 2019, yaitu sebesar Rp 2.976.705. Selanjutnya upah minimum provinsi tertinggi kedua di Pulau Sumatera yakni di Provinsi Aceh sebesar Rp 2.935.985. Sementara itu, upah minimum provinsi paling rendah yaitu di Provinsi Bengkulu sebesar Rp 2.040.407 dan Provinsi Lampung sebesar Rp 2.241.269.

Tingkat pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi juga produktivitas dari tenaga kerja yang dapat dihasilkan (McConnell, dkk 2006). Sehingga orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi mampu bersaing di dunia pasar tenaga kerja. Selain itu, ketika tenaga kerja berpendidikan beralih pekerjaan, mereka biasanya beralih tanpa mengalami periode pengangguran (Borjas, 2016). Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian (Lavrinovicha, dkk, 2015), menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran dan pendapatan penduduk di Latvia pada tingkat signifikansi 0,01.

Pada Tabel 1.3 menunjukkan tingkat pendidikan di Pulau Sumatera yang mana diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang ditempuh oleh suatu penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tertinggi di Pulau Sumatera, yaitu di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 9,99 tahun , diikuti Provinsi Utara sebesar 9,45 tahun, Provinsi Aceh sebesar 9,18 tahun, Provinsi Sumatera Riau sebesar 9,03 tahun, Provinsi Kepulauan Sumatera Barat sebesar 8,92 tahun, Provinsi Bengkulu sebesar 8,73 tahun, Provinsi Jambi sebesar 8,45 tahun, Provinsi Sumatera Selatan sebesar 8,18 tahun, Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung 7,98 tahun, dan yang terakhir yaitu di Provinsi Sumatera Selatan dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,92 tahun.

Secara umum, pendidikan merupakan suatu proses dalam meningkatkan kualitas dari sumberdaya manusia. Hasil yang ingin dicapai dalam pendidikan yaitu agar terciptanya sumberdaya manusia yang berkompeten dan sesuai dengan tuntutan pembangunan. Di mana dirinya memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lapangan pekerjaan, sehingga nantinya masalah pengangguran dapat terhindari.

Berdasarkan fenomena dan uraian di atas, masalah pengangguran cenderung masih menjadi masalah utama bagi suatu perekonomian. Dilihat dari Tabel 1.1 tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera masih tertinggi kedua jika dibandingkan dengan pulau besar lainnya. Tingginya tingkat pengangguran yang dihadapi tentu akan berpengaruh buruk bagi kehidupan masyarakat sekitar dan perekonomian di Pulau Sumater. Tentu saja hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah Minimum, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Di Pulau Sumatera”.

1.2 Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Pulau Sumatera tahun 2011-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Di dalam penelitian ini terdapat tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Pulau Sumatera tahun 2011-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini nantinya bisa memberikan manfaat baik itu secara teoritis ataupun secara praktis. Sehingga penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis, peneliti lain ataupun pemerintah.

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh sebagai berikut:

- 1) Bagi Penulis, penelitian ini bisa menjadi sebagai wawasan tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Pulau Sumatera periode 2011-2019.
- 2) Bagi Peneliti lain, penelitian ini bisa dijadikan sebagai bentuk referensi, apabila penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan permasalahan yang serupa.
- 3) Bagi Pemerintah, dapat dijadikan sebagai bahan dalam pertimbangan untuk mengatasi masalah tingkat pengangguran yang ada di Pulau Sumatera.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini akan dilakukan di Pulau Sumatera dalam model data panel yang mana meliputi data *time series* dari tahun 2011 sampai tahun 2019 dan *cross section* dari 10 provinsi di Pulau Sumatera. Adapun variabel yang akan diteliti adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (Y), Pertumbuhan Ekonomi (X1), Inflasi (X2), Upah Minimum (X3), dan Tingkat Pendidikan (X4).

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam melakukan penelitian ini, maka diperlukan beberapa teori-teori dan hasil penelitian dari beberapa penelitian sebelumnya terkait permasalahan yang serupa, sehingga hal ini bisa menjadi sebagai landasan peneliti dalam pembuatan penelitian ini.

2.1.1 Pengangguran

Pengangguran merupakan fenomena yang sering kali dijumpai di setiap negara manapun. Masalah pengangguran sampai sejauh ini masih menjadi permasalahan yang cukup sulit untuk diatasi. Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah baik dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah daerah belum cukup untuk mengatasi masalah pengangguran yang terjadi. Perkembangan tingkat pengangguran yang dialami di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2019 masih terjadi naik turun. Menurut laporan BPS tingkat pengangguran di Indonesia di tahun 2015 terjadi kenaikan yaitu sebesar 6,18 persen yang mana sebelumnya pada tahun 2014 hanya sebesar 5,94 persen.

A. Definisi Pengangguran

Secara umum, pengangguran merupakan kondisi seseorang yang masuk dalam angkatan kerja namun belum mendapatkan pekerjaan tetapi secara aktif berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran adalah seseorang yang sudah berusia 16 tahun ke atas, masuk dalam angkatan kerja, dan sudah siap untuk bekerja, namun belum mendapatkan pekerjaan tetapi secara aktif telah terlibat dalam

mencari pekerjaan selama 4 minggu (McConnell, dkk, 2006). Menurut Ehrenberg & Smith (2012) Pengangguran adalah seorang yang telah di PHK dari pekerjaan sebelumnya dan sedang menunggu untuk dipanggil kembali oleh pemberi pekerjaan atau seseorang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali tetapi secara aktif telah terlibat dalam mencari pekerjaan.

Di Indonesia setiap daerah memiliki perkembangan angka pengangguran yang berbeda-beda. Perkembangan angka pengangguran di setiap daerah dapat dilihat berdasarkan dari tingkat penganggurannya. Tingkat pengangguran merupakan rasio dari perbandingan antara total pengangguran terhadap total angkatan kerja (Ehrenberg & Smith, 2012). Secara umum, di Indonesia parameter pengangguran diukur melalui tingkat pengangguran terbuka yang mana hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama untuk digunakan sejak tahun 2000 (Tukiran, 2014). Adapun rumus dalam penghitung tingkat pengangguran terbuka menurut BPS sebagai berikut:

$$TPT = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Dimana :

a = Jumlah pengangguran

b = Jumlah angkatan kerja

B. Jenis-Jenis Pengangguran

Menurut Borjas (2008) jenis pengangguran dibagi menjadi empat jenis, antara lain yaitu :

- 1) Pengangguran friksional merupakan jenis pengangguran ini timbul karena adanya hambatan dalam mempertemukan angkatan kerja dengan lowongan

kerja. Secara umum, pengangguran friksional terjadi disebabkan adanya masa transisi sementara dalam kehidupan angkatan kerja, seperti ketika angkatan kerja yang berpindah ke tempat tinggal baru yang mengharuskan mereka untuk mencari pekerjaan baru atau angkatan kerja yang baru saja telah menyelesaikan pendidikannya sehingga harus mencari informasi terkait lowongan kerja untuk mendapatkan pekerjaan.

- 2) Pengangguran musiman merupakan jenis pengangguran ini umumnya terjadi ketika angkatan kerja yang menganggur pada periode waktu tertentu dalam setahun, umumnya mereka bekerja dibidang industri yang tidak selalu membutuhkannya sepanjang tahun.
- 3) Pengangguran struktural merupakan jenis pengangguran ini muncul disebabkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah para pencari kerja dengan jenis pekerjaan yang tersedia. Pengangguran struktural masih dapat terjadi apabila masih terdapat ketidakcocokan antara pekerja dengan jenis pekerjaan yang tersedia.
- 4) Pengangguran siklis merupakan jenis pengangguran ini terjadi karena menurunnya permintaan akan barang serta jasa yang berpengaruh pada turunnya permintaan tenaga kerja. Turunnya permintaan tenaga kerja di pasar juga disebabkan oleh kekakuan upah yang ditetapkan oleh pemerintah melalui penetapan upah minimum sehingga kekakuan upah tersebut tidak dapat menyesuaikan dengan perekonomian saat itu yang mana pada akhirnya berdampak pada penurunan permintaan tenaga kerja di pasar.

Menurut Sukirno (2010) jenis-jenis pengangguran juga dapat di golongan menjadi dua, yaitu jenis pengangguran dari penyebabnya dan dari cirinya. Jenis-jenis pengangguran yang berdasarkan dari penyebabnya, antara lain yaitu:

- 1) Pengangguran normal adalah jenis pengangguran yang terjadi disebabkan para pencari kerja ingin mencari jenis pekerjaan yang lebih baik, sehingga pada masa proses mencari pekerjaan baru para pencari kerja dapat dikatakan sebagai pengangguran.
- 2) Pengangguran siklikal adalah jenis pengangguran yang terjadi disebabkan turunnya permintaan agregat yang mana menyebabkan permintaan akan tenaga kerja berkurang yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya pengangguran
- 3) Pengangguran struktural ialah jenis pengangguran yang terjadi disebabkan terjadinya perubahan struktur dalam kegiatan ekonomi.
- 4) Pengangguran teknologi adalah jenis pengangguran yang terjadi disebabkan dari kemajuan dalam bidang teknologi yang menyebabkan penggunaan mesin dalam faktor produksi lebih dominan digunakan dibandingkan tenaga manusia, sehingga permintaan akan tenaga kerja berkurang yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya pengangguran.

Jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya (Sukirno, 2010):

- 1) Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang secara nyata dan sepenuh waktu, umumnya jenis pengangguran ini disebabkan rendahnya pertumbuhan lowongan kerja dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja.
- 2) Pengangguran tersembunyi ialah jenis pengangguran yang disebabkan oleh banyaknya jumlah pekerja di dalam suatu kegiatan ekonomi.

- 3) Pengangguran bermusim ialah jenis pengangguran yang disebabkan akibat perubahan musim yang ada, umumnya pengangguran bermusim dialami di sektor pertanian.
- 4) Setengah menganggur adalah jenis pengangguran yang disebabkan kurangnya jam kerja pada tenaga kerja atau jam kerja mereka belum mencukupi dari jam kerja yang normal.

C. Dampak pengangguran

Masalah pengangguran merupakan suatu permasalahan yang cukup sentral dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Apabila dalam suatu negara/daerah mengalami tingkat pengangguran yang cukup tinggi tentu hal ini akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat, khususnya dibidang ekonomis dan sosial. Menurut Samuelson (1992) jika angka pengangguran tinggi, maka hal ini akan berdampak pada bidang ekonomis, seperti turunnya output yang dapat dihasilkan, pendapatan masyarakat turun, dan yang paling parah adalah terjadinya depresi besar dalam perekonomian. Selain berdampak pada bidang ekonomis, pengangguran juga akan berdampak bidang sosial, seperti beban perasaan, sosial dan psikologis dalam diri.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran

Dalam menghadapi permasalahan pengangguran yang terjadi, maka kita perlu mengetahui terlebih lanjut apa saja faktor yang dapat mempengaruhi pengangguran tersebut. Menurut Kaufman & Hotchkiss (Pujoalwanto, 2014), terdapat tiga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengangguran sebagai berikut:

1) Proses Mencari Kerja

Proses mencari kerja adalah salah faktor yang bisa mempengaruhi pengangguran. Bertambahnya jumlah angkatan kerja akan berdampak pada persaingan yang ketat dalam proses mencari pekerjaan. Dalam proses mencari pekerjaan setiap pencari kerja wajib memiliki kualifikasi tertentu sesuai yang dimintai oleh suatu perusahaan yang membuka lowongan kerja, jika pencari kerja tidak dapat memenuhi syarat yang diminta maka pencari kerja akan sulit bersaing dalam pasar tenaga kerja yang pada akhirnya akan menyebabkan pencari kerja tersingkir dari pasar persaingan kerja dan menjadi pengangguran.

2) Kekakuan Upah

Kekakuan upah juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pengangguran. Dengan adanya kekakuan upah yang tidak selalu fleksibel, khususnya pada saat terjadi penurunan produksi dalam suatu perekonomian maka permintaan tenaga kerja akan mengalami penurunan yang mana pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya kelebihan penawaran tenaga kerja. Terjadinya kelebihan penawaran kerja yang disebabkan oleh turunnya permintaan tenaga kerja akan mengakibatkan terjadi pengangguran.

3) Efisiensi Upah

Efisiensi upah juga adalah faktor yang bisa mempengaruhi pengangguran. Semakin tinggi suatu perusahaan memberikan upah kepada para pekerja maka akan membuat para pekerja semakin produktif, tetapi hal ini malah akan menimbulkan konsekuensi yang buruk jika perusahaan membayar lebih pada tenaga kerja yang mempunyai efisiensi lebih tinggi maka bakal terjadi

pengangguran terpaksa akibat dari persaingan yang ketat dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

Adapun faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi pengangguran yaitu pertumbuhan ekonomi. Menurut Gatningsih & Sutrisno (2017) jika output dan pengeluaran total menurun, maka permintaan terhadap tenaga kerja sangat rendah. Ini artinya sama dengan terjadi peningkatan pengangguran. Hal ini terjadi ketika kemampuan ekonomi suatu negara lebih rendah dari kemampuan yang seharusnya dicapai. Ketika siklus perekonomian sedang menurun, maka para pencari pekerjaan dipaksa untuk menganggur karena terlalu banyaknya tenaga kerja yang ingin bekerja, namun pekerjaan itu tidak tersedia. Pengangguran yang disebabkan oleh turunnya output dan pengeluaran total ini disebut dengan pengangguran cyclical.

Dalam Kurva Philips menjelaskan bahwa inflasi juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Dimana hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran memiliki hubungan yang negatif (Borjas, 2008). Semakin tinggi output dari perekonomian dan semakin tinggi juga tingkat harga. Output yang lebih besar berarti tingkat pengangguran yang lebih rendah karena penyerapan faktor-faktor produksi menjadi lebih tinggi. Jadi pergeseran pada permintaan agregat akan mendorong inflasi dan pengangguran berlawanan arah dalam jangka pendek. Artinya kenaikan pada inflasi bakal menurunkan tingkat pengangguran dan sebaliknya apabila inflasi turun maka tingkat pengangguran akan naik.

Pendidikan juga adalah faktor yang bisa mempengaruhi pengangguran. Dalam *Human Capital Theory* dijelaskan bahwa jika angkatan kerja memiliki

tingkat pendidikan semakin tinggi, maka produktivitas yang dapat dihasilkan juga akan tinggi (Ehrenberg & Smith, 2012). Produktivitas yang tinggi yang dapat dihasilkan dari suatu tenaga kerja merupakan salah satu modal dalam pasar tenaga kerja, sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan dari angkatan kerja tersebut, maka kesempatan kerja yang diperoleh juga semakin tinggi. Dapat dikatakan dengan adanya tingkat pendidikan dari angkatan kerja, maka dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pengangguran.

Berdasarkan dari uraian beberapa teori yang sudah dijelaskan oleh sebagian ahli, maka bisa disimpulkan sementara bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tingkat pengangguran, yaitu dari faktor pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum, serta tingkat pendidikan.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Oleh karena itu, tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang dijadikan pemerintah sebagai sasaran utama dalam pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan kenaikan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu.

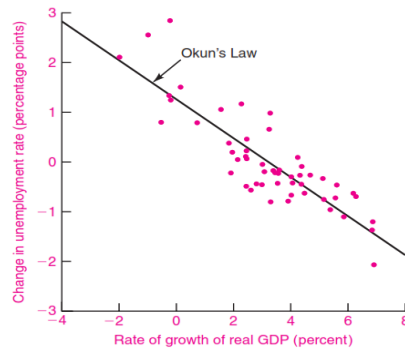
Menurut Samuelson & Nordhaus (1992) pertumbuhan ekonomi adalah suatu gambaran dari perkembangan sebuah kegiatan dalam suatu perekonomian negara/daerah. Di mana barang maupun jasa yang diproduksi di dalam masyarakat

meningkat, atau juga pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan batas kemungkinan produksi (*PPF*) suatu negara/daerah.

Secara umum, pengukuran pertumbuhan ekonomi daerah dilakukan dengan menghitung pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Menurut Badan Pusat Statistik (2021), PDRB adalah total nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit usaha dalam suatu wilayah domestik, yang mana tidak harus memperdulikan apakah faktor produksi tersebut dimiliki dari luar maupun itu dimiliki oleh penduduk dari daerah tersebut. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Laju pertumbuhan PDRB ini digunakan sebagai indikator apakah kebijakan yang telah dilaksanakan efektif atau tidak. Perhitungan pertumbuhan biasanya dilakukan dalam waktu tahunan untuk melihat bagaimana perkembangan perekonomian suatu daerah.

A. Teori Okun's

Dalam teori ekonomi dikenal istilah teori Okun (Okun's Law), yaitu teori yang dikenalkan oleh Arthur Melvin Okun (1962) untuk menguji secara empiris hubungan antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Teori Okun menyatakan adanya hubungan terbalik (negatif) antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka tingkat pengangguran akan mengalami penurunan. Namun sebaliknya, semakin rendah pertumbuhan ekonomi maka tingkat pengangguran akan mengalami kenaikan (Samuelson & Nordhaus, 2010).



Gambar 2.1 Hukum Okun
Sumber: Samuelson (2010)

Hubungan antara kedua variabel tersebut muncul dari suatu pengamatan dimana semakin tinggi suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa maka akan lebih banyak tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa tersebut. Sehingga pada akhirnya kenaikan dari pertumbuhan ekonomi akan mendorong penyerapan tenaga kerja akan semakin tinggi dan akan berdampak pada turunnya tingkat pengangguran.

Suatu negara atau daerah mungkin akan memiliki persamaan koefisien Okun yang berbeda, sehingga angka limitasi nya juga akan berbeda. Pernyataan sebagai hukum Okun, meskipun terlalu naif bila dikatakan hukum, karena tidak memiliki dasar-dasar yang pasti untuk menjadi suatu hukum. Akan tetapi pernyataan tersebut cukup memberikan informasi atau bukti empiris bahwa terdapat hubungan terbalik antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran.

B. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran

Hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran dijelaskan teori Okun yang menyatakan terdapat pengaruh negatif antara pertumbuhan

ekonomi dengan tingkat pengangguran. Selain itu, dalam model pertumbuhan ekonomi neo-klasik juga menggambarkan output dari suatu perekonomian dapat dihasilkan dari dua jenis input, yaitu modal dan tenaga kerja (Samuelson & Nordhaus, 1992). Dalam fungsi produksi menjelaskan hubungan antara tingkat output (Y) dengan tingkat input. Dimana laju pertumbuhan PDRB merupakan output (Y), sementara input terdiri dari modal (K) serta tenaga kerja (L). Sehingga turunan pertama dari fungsi produksi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = f(K,L)$$

Berdasarkan pada fungsi tersebut dapat kita lihat bahwa nilai dari pertumbuhan PDRB (output) dapat dipengaruhi secara langsung oleh tingkat modal (K) dan tenaga kerja (L). Artinya jika terjadi kenaikan pada output yaitu pertumbuhan ekonomi, maka permintaan tenaga kerja akan mengalami kenaikan. Kenaikan pada permintaan tenaga kerja akan berakibat pada turunnya tingkat pengangguran. Sebaliknya jika PDB riil turun maka akan menyebabkan output yang diproduksi turun. Turunnya produksi mengakibatkan produsen mengurangi input dalam hal ini tenaga kerja yang akhirnya pengangguran meningkat.

2.1.3 Inflasi

Inflasi merupakan perkembangan dari kenaikan harga-harga barang serta jasa secara menyeluruh dan berlangsung secara terus menerus, jika terjadi kenaikan pada satu dan dua barang, itu belum dapat dikatakan sebagai inflasi, kecuali jika harga barang tersebut merembet pada harga barang yang lainnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) inflasi adalah kecenderungan dari naiknya tingkatan harga barang dan jasa secara keseluruhan yang berlangsung

secara terus menerus. Bila harga barang dan jasa dalam negeri meningkat, maka dapat dikatakan inflasi mengalami kenaikan. Inflasi bisa kita artikan sebagai turunnya sebuah nilai mata uang terhadap barang maupun jasa secara keseluruhan.

Menurut Samuelson & Nordhaus (1992) inflasi adalah gambaran dari kenaikan dalam tingkat harga secara umum. Sementara itu untuk mengukur perubahan dari tingkat harga secara umum dapat diukur melalui laju inflasi atau tingkat inflasi.

A. Jenis–Jenis Inflasi

Secara umum jenis-jenis inflasi dapat digolongkan berdasarkan tiga golongan, yaitu inflasi yang berdasarkan pada sifatnya, inflasi yang berdasarkan sebab muasab, dan inflasi yang berdasarkan asal inflasi.

1) Jenis inflasi berdasarkan sifatnya

Menurut Latumaerissa (2015) penggolongan inflasi berdasarkan sifatnya dibagi menjadi empat, yaitu:

- Inflasi rendah (kurang dari 10% per tahun)
- Inflasi sedang (10 – 30% per tahun)
- Inflasi berat (30%-100% per tahun)
- Hiperinflasi (lebih dari 100% per tahun)

Sedangkan menurut Samuelson (1992) inflasi berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga, yaitu:

- *Moderat inflation* (di bawah 10%)
- *Galloping inflation* (20%-200% per tahun)
- *Hyperinflation* (lebih dari 200% per tahun)

2) Jenis inflasi berdasarkan sebab muasab

Menurut Latumaerissa (2015) dan Samuelson (1992) penggolong inflasi berdasarkan sebab muasab dibagi menjadi dua, yaitu:

- *Demand pull inflation* adalah inflasi yang timbul akibat dari permintaan masyarakat yang begitu kuat terhadap barang maupun jasa yang diminta, sementara jumlah barang maupun jasa yang tersedia bersifat terbatas.
- *Cost push inflation* adalah jenis inflasi yang disebabkan oleh naiknya biaya faktor produksi secara terus-menerus serta pada jangka waktu tertentu.

3) Jenis inflasi berdasarkan asalnya

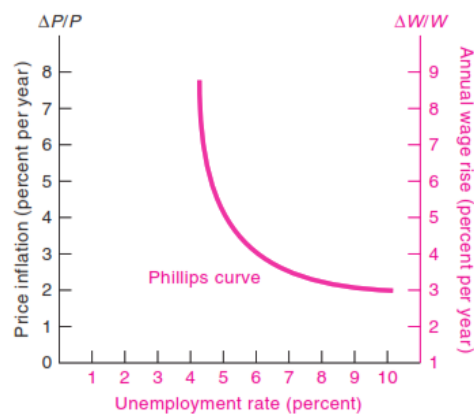
Menurut Boediono (1982) penggolongan inflasi berdasarkan asalnya sebagai berikut:

- *Domestic inflation* adalah inflasi yang muncul dari dalam negeri, seperti terjadinya defisit anggaran, bertambahnya jumlah uang beredar di masyarakat, atau terjadinya gagal panen yang menyebabkan terjadinya kelangkaan dan sebagainya.
- *Imported inflation* adalah inflasi yang muncul dari luar negeri. Inflasi ini umumnya timbul karena dipengaruhi oleh kenaikan pada harga-harga barang kebutuhan yang berasal dari luar negeri atau di negara-negara mitra dagang.

B. Teori A.W Phillips

Dalam teori A.W Phillips dijelaskan bahwa inflasi dan pengangguran memiliki hubungan yang negatif. Dimana kenaikan pada tingkat inflasi akan menyebabkan turunnya tingkat pengangguran. Sebaliknya apabila tingkat inflasi turun maka tingkat pengangguran akan mengalami kenaikan. Kurva Philips

mengilustrasikan terjadinya “trade off” dalam jangka pendek antara inflasi dengan tingkat pengangguran. Menurut pandangan kurva Philips, negara dapat menurunkan tingkat pengangguran menjadi rendah apabila bersedia untuk membayar dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi (Samuelson & Nordhaus, 1992).



Gambar 2.4 Kurva Phillips
Sumber: Samuelson (2010)

Pada Gambar 2.4 dalam kurva Phillips menggambarkan hubungan terbalik antara inflasi dan tingkat pengangguran, Dimana inflasi dan tingkat pengangguran memiliki slope negatif, sehingga apabila inflasi naik maka tingkat pengangguran akan bergeser ke kiri artinya kenaikan dari inflasi akan menyebabkan tingkat pengangguran turun. Namun sebaliknya, apabila inflasi turun maka tingkat pengangguran akan bergeser ke kanan atau tingkat pengangguran mengalami kenaikan. Dalam menurunkan tingkat pengangguran pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal dan moneter tetapi dengan konsekuensi harus mengorbankan tingkat inflasi yang lebih tinggi (Borjas, 2008).

C. Hubungan Inflasi dan Tingkat Pengangguran

Hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran dijelaskan dalam teori kurva Phillips yang menyatakan bahwa inflasi dan tingkat pengangguran memiliki hubungan yang terbalik (Borjas, 2008). Hal ini didasarkan semakin tinggi output dari perekonomian dan semakin tinggi juga tingkat harga. Output yang lebih besar berarti tingkat pengangguran yang lebih rendah karena penyerapan faktor-faktor produksi menjadi lebih tinggi. Jadi pergeseran pada permintaan agregat akan mendorong inflasi dan pengangguran berlawanan arah dalam jangka pendek. Artinya kenaikan pada inflasi akan menurunkan tingkat pengangguran dan sebaliknya apabila inflasi turun maka tingkat pengangguran akan naik.

2.1.4 Upah Minimum

Upah adalah suatu bayaran yang diterima oleh seorang pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan pekerja tersebut. Pada dasarnya besaran tingkat upah yang diterima oleh pekerja masing-masing berbeda, sesuai pada jenis pekerjaan yang dilakukan dan perjanjian yang telah disepakati. Seperti yang dijelaskan pada PP No 36 Tahun 2021 Pasal 7 ayat 1, dijelaskan bahwa upah terdiri dari beberapa komponen, yaitu (a) upah tanpa tunjangan, (b) upah pokok dan tunjangan tetap (c) upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, (d) upah pokok dan tunjangan tidak tetap.

A. Jenis-Jenis Upah

Menurut Asyhadie (2007) upah dapat dibedakan menjadi lima jenis, sebagai berikut:

- 1) Upah nominal merupakan jenis upah yang dibayarkan dalam bentuk tunai kepada pekerja/buruh sebagai bentuk imbalan jasa yang telah diberikan sesuai dengan pada ketentuan dan kesepakatan di dalam perjanjian kerja.
- 2) Upah nyata (*Real Wages*) merupakan jenis upah uang secara nyata diterima oleh seorang pekerja yang memiliki hak atas upah tersebut. Dalam menentukan upah nyata dapat ditentukan melalui daya beli dari upah itu.
- 3) Upah hidup merupakan jenis upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh secara relatif bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara luas, tidak hanya dari segi kebutuhan pokok melainkan juga dari kebutuhan sosial keluarganya, seperti asuransi, pendidikan, rekreasi, dan lainnya.
- 4) Upah minimum merupakan jenis upah bulanan terendah yang dijadikan sebagai patokan oleh sebuah perusahaan dalam menentukan besaran upah yang bakal diberikan kepada pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Secara umum, upah minimum dijadikan patokan upah terendah dalam suatu daerah dan ditetapkan melalui gubernur serta besaran upah tersebut setiap tahunnya berubah.
- 5) Upah wajar merupakan upah yang dibayarkan oleh sebuah perusahaan kepada pekerja/buruh, yang mana secara relatif nilai upah tersebut dinilai cukup wajar.

B. Upah Minimum

Upah minimum adalah upah bulanan terendah (meliputi upah pokok serta tunjangan tetap) dibayarkan kepada pekerja/buruh sebagai bentuk imbalan atas pekerjaannya. Di Indonesia penetapan upah minimum ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya, yang mana penetapan upah minimum didasari atas kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam melakukan penetapan upah minimum provinsi, biasanya ditetapkan oleh gubernur. Dalam PP No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, penetapan upah minimum provinsi dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

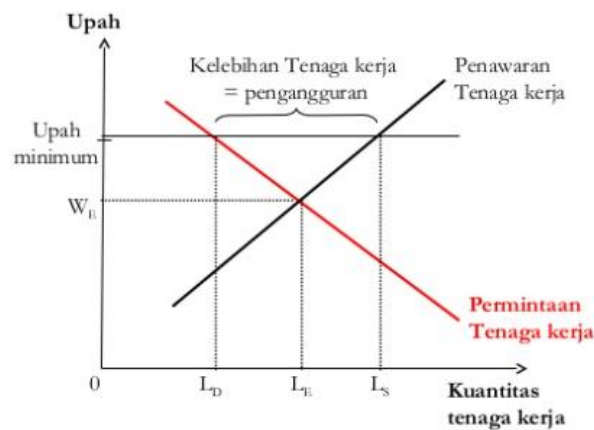
$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \{ \text{Max}(PE_{(t)}, \text{Inflasi}_{(t)}) \times \left[\frac{\text{Batas atas}(t) - UM_{(t)}}{\text{Batas atas}(t) - \text{Batas bawah}(t)} \right] \times UM_{(t)} \}$$

Terkait upah minimum, PP No.36 Tahun 2021 menegaskan upah minimum berlaku bagi buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun di perusahaan yang bersangkutan. Buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun upahnya mengacu struktur dan skala upah. Sebagaimana UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No.36 Tahun 2021 menghapus upah minimum sektoral. PP 36/2021 ini hanya mengatur upah minimum provinsi, dan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

C. Teori Kekakuan Upah

Adapun hubungan antara upah minimum dengan tingkat pengangguran dapat kita lihat dalam kekakuan upah (wage rigidity), dimana upah bersifat tidak selalu fleksibel kadang kala upah rill tertahan diatas tingkat ekuilibrium. Pada saat upah rill berada diatas tingkat ekuilibrium permintaan dan penawaran tenaga kerja, maka penawaran tenaga kerja akan melebihi dari permintaan tenaga kerja.

Sehingga pada saat kondisi tersebut terjadi maka jumlah penawaran kerja yang belum dapat terserap oleh permintaan tenaga kerja akan menimbulkan terjadinya pengangguran. Kekakuan upah riil akan mengurangi penggunaan tenaga kerja dan akan mempertinggi tingkat pengangguran (Makiw, 2006).



Gambar 2.5 Kurva Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Sumber : Chusna (2013)

Berdasarkan Gambar 2.3 bisa kita lihat bahwa pada saat tingkat upah berada di (W_e), permintaan dan penawaran tenaga kerja adalah (L_e). Ketika upah tersebut naik dari (W_e) ke (W_i), jumlah penawaran tenaga kerja akan meningkat dari (L_e) ke (L_s), namun permintaan tenaga kerja akan turun dari (L_e) ke (L_d). Sehingga dapat dikatakan selisih diantara (L_s) dan (L_d) merupakan jumlah pengangguran (Chusna, 2013). Dari Gambar 2.3 saat upah riil melebihi tingkat ekuilibrium dan penawaran pekerja melebihi permintaannya, maka perusahaan-perusahaan diharapkan akan menurunkan upah yang akan dibayar kepada para pekerja. Namun pada kenyataannya, hal ini tidak terjadi. Pengangguran struktural

kemudian muncul sebagai implikasi karena perusahaan gagal menurunkan upah akibat kelebihan penawaran tenaga kerja Mankiw (2003).

D. Hubungan Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran

Menurut Sukatonto dan Karseno (2008) tingkat upah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengangguran. Hal ini didasari kenaikan tingkat upah akan menyebabkan kenaikan biaya faktor produksi sehingga menyebabkan kenaikan harga pada produk. Kenaikan dari harga produk tersebut akan mendapatkan respon negatif dari konsumen sehingga konsumen akan mengurangi pembelian. Pada saat kondisi permintaan konsumen turun maka produsen akan mengurangi produksi dan akan berpengaruh terhadap pengurangan jumlah tenaga kerja yang diserap dan pada akhirnya pengangguran akan meningkat.

2.1.5 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat menjadi suatu faktor yang bisa mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu daerah. Pasalnya sekarang dalam memasuki dunia pasar kerja para pencari kerja diharuskan memiliki kemampuan serta pengetahuan yang mumpuni, belum lagi beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pencari kerja ketika memasukkan lamaran kerja, seperti riwayat pendidikan yang ditamatkan.

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar serta terencana dalam menciptakan proses belajar serta pembelajaran dengan maksud tujuan untuk mengembangkan potensi pada diri agar dapat memiliki kepribadian, kecerdasan, pengendalian diri, religius, dan keterampilan yang dapat berguna baik untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut KBBI (2021) pendidikan adalah suatu proses dalam merubah sikap dan perilaku orang atau kelompok untuk menciptakan kedewasaan diri pada manusia melalui proses pendidikan, pelatihan dan pengajaran. Menurut UNESCO terdapat empat pilar pendidikan, antara lain *Learning to know*, *Learning to do*, *Learning to live*, dan *Learning together in peace*. Secara umum, pendidikan bisa kita artikan sebagai suatu proses peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan dan potensi diri melalui sistem pembelajaran.

A. Jenis-Jenis Pendidikan

Dalam UU NO. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan, pendidikan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu jalur pendidikan, jenjang pendidikan, dan jenis pendidikan.

- 1) Pendidikan berdasarkan jalur pendidikan, meliputi (a) Pendidikan formal, (b) Pendidikan nonformal, (c) Pendidikan informal.
- 2) Pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan, meliputi (a) Pendidikan dasar, (b) Pendidikan menengah, (c) Pendidikan tinggi.
- 3) Pendidikan berdasarkan jenis pendidikan, meliputi (a) Pendidikan umum, (b), Pendidikan kejuruan, (c) Pendidikan akademik, (d) Pendidikan profesi, (e) Pendidikan vakasi, (f) Pendidikan keagamaan, (g) Pendidikan khusus.

B. Teori Human Capital

Dalam teori *human capital* dijelaskan bahwa semakin tinggi pendidikan angkatan kerja, maka produktivitas yang dapat dihasilkan juga semakin tinggi (Ehrenberg & Smith, 2012). Setiap penambahan satu tahun pendidikan bakal meningkatkan kemampuan produktivitas dari angkatan kerja, namun juga pada

satu sisi akan menunda penerimaan dari pendapatan selama setahun dalam pendidikan, jadi pendidikan tersebut dapat dikatakan sebagai investasi sumberdaya manusia (Borjas, 2016).

Menurut McChonnell, dkk (2006) semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi juga produktivitas dari tenaga kerja yang dapat dihasilkan. Sehingga orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi mampu bersaing di dunia pasar tenaga kerja. Selain itu, ketika tenaga kerja berpendidikan beralih pekerjaan, mereka biasanya beralih tanpa mengalami periode pengangguran (Borjas, 2016). Dengan kata lain angkatan kerja yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan mudah bersaing dalam dunia pasar kerja, sehingga apabila angkatan kerja memiliki pendidikan semakin tinggi maka kemungkinan terjadinya pengangguran akan semakin kecil.

C. Hubungan Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran

Hubungan tingkat Pendidikan dengan tingkat pengangguran memiliki hubungan yang negatif. Semakin tingkat pendidikan maka tingkat pengangguran juga akan semakin rendah. Dalam dunia pasar kerja seorang angkatan kerja yang melamar pekerjaan baik di sebuah perusahaan, industri ataupun di instansi pemerintahan, harus memenuhi beberapa persyaratan awal dalam melamar kerja, seperti riwayat pendidikan, pengalaman kerja, kemampuan dan pengetahuan. Seseorang angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki kesempatan kerja tinggi dibanding dengan angkatan kerja berpendidikan rendah. Ketika tenaga kerja berpendidikan beralih pekerjaan, mereka biasanya beralih tanpa mengalami periode pengangguran (Borjas, 2016).

2.2 Penelitian Terdahulu

Asif (2013), *Factors Effecting Unemployment: A Cross Country Analysis*. Penelitian ini dilakukan di tiga negara yaitu India, China dan Pakistan. Variabel yang diteliti yaitu tingkat inflasi, nilai tukar, pertumbuhan PDB, dan populasi sebagai variabel bebas dan tingkat pengangguran sebagai variabel terikat. Hasil analisis regresi menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari semua variabel, yaitu tingkat inflasi, nilai tukar, pertumbuhan PDB, dan populasi terhadap tingkat pengangguran di tiga negara yaitu India, China dan Pakistan. Hasil dari kausalitas granger menemukan bahwa tidak terdapat hubungan dua arah di antara variabel manapun pada ketiga negara tersebut. Dan pada hasil uji kointegrasi menemukan bahwa terdapat hubungan jangka panjang dalam variabel untuk semua model.

Lavrinovicha, dkk (2015), *Influence of education on unemployment rate and incomes of residents*. Penelitian ini dilakukan di Negara Latvia, dimana variabel yang diteliti yaitu tingkat pengangguran dan pendapatan penduduk sebagai variabel terikat dan tingkat pendidikan sebagai variabel bebas. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi. Hasil analisis regresi menunjukkan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran dan pendapatan penduduk di Latvia pada tingkat signifikansi 0,01.

Macharia dan Otieno (2015), *Effect of Inflation on Unemployment In Kenya*. Penelitian ini dilakukan di Kenya, dimana variabel yang diteliti, yaitu inflasi dan tingkat pengangguran. Hasil analisis regresi dan kointegrasi menunjukkan terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara tingkat inflasi

terhadap tingkat pengangguran di Kenya baik pada jangka pendek dan jangka panjang.

Sadiku, dkk (2015), *Econometric Estimation of the Relationship between Unemployment Rate and Economic Growth of FYR of Macedonia*. Hasil analisis model dinamis, model perbedaan, ECM, dan pendekatan estimasi VAR menunjukkan tidak terdapat hubungan terbalik antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Macedonia. Dari model ECM menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan jangka pendek antar kedua variabel tersebut. Selain itu, hubungan jangka panjang dalam model VAR menyimpulkan bahwa perubahan tingkat pengangguran bukan merupakan variabel prediksi dari perubahan pertumbuhan PDB rill. Dalam uji kausalitas Granger juga tidak menunjukkan hubungan kausal antara perubahan pertumbuhan PDB rill dan tingkat pengangguran dan sebaliknya.

Misini & Pantina (2017), *The Effect of Economic Growth in Relation to Unemployment*. Penelitian ini dilakukan di Negara Kosovo, dimana variabel yang diteliti adalah tingkat pengangguran sebagai variabel terikat dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel bebas. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear sederhana. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif serta signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kosovo, di mana setiap 1% kenaikan pada pertumbuhan PDB nominal akan mengurangi tingkat pengangguran di Kosovo sebesar 0,43%.

Puspajuita (2017), *Factors that Influence the Rate of Unemployment in Indonesia*. Hasil analisis regresi linier berganda pada $\alpha = 5\%$ menunjukkan bahwa variabel angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat

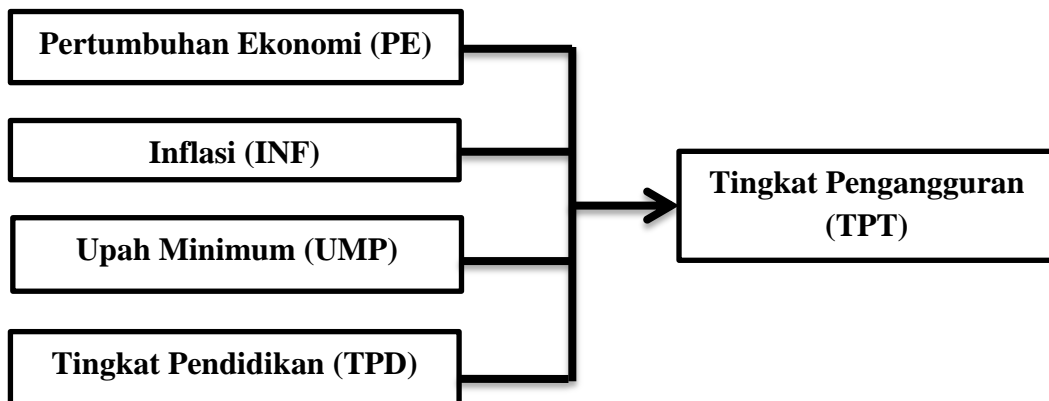
pengangguran di Indonesia. Sementara, variabel industrialisasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Variabel urbanisasi, elastisitas penyerapan tenaga kerja dan upah minimum regional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.

Singh (2018), *Impact of GDP and Inflation on Unemployment rate: "A Study of Indian Economy in 2011-2018"*. Penelitian ini mengkaji dampak inflasi terhadap PDB dan tingkat pengangguran di India. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi. Hasil analisis menemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDB dan tingkat pengangguran di India.

Soylu, dkk (2018), *Economic growth and unemployment issue: Panel data analysis in Eastern European Countries*. Penelitian ini dilakukan di Negara-negara Eropa timur, dimana variabel yang diteliti adalah tingkat pengangguran sebagai variabel terikat dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel bebas. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi data panel (*Random Effect model*). Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien pertumbuhan PDB yaitu -0,089 serta signifikan pada tingkat signifikansi 0,05, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan PDB akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,08 persen.

Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak dalam variabel yang akan digunakan nanti. Pada variabel yang akan digunakan nanti merupakan penggabungan dari beberapa variabel pada penelitian yang berbeda sehingga didapati variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum provinsi, dan tingkat pendidikan.

2.3 Rerangka Analisis



Gambar 2.4 Rerangka Analisis

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan dalam penelitian yang mana masih bersifat praduga sebab kebenarannya perlu dibuktikan. Maka berdasarkan rerangka analisis pada Gambar 2.3, hipotesis di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Pulau Sumatera.
2. Diduga tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Pulau Sumatera.
3. Diduga upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran di Pulau Sumatera.
4. Diduga tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Pulau Sumatera.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *explanatory research* yaitu menjelaskan bagaimana hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah variabel terikat (TPT), sedangkan bebas yang diambil adalah Pertumbuhan Ekonomi (PE), Tingkat Inflasi (INF), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Tingkat Pendidikan (TPD).

3.2 Definisi Operasional

1. Tingkat pengangguran (TPT) dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka, yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (15-64 tahun), adapun data tingkat pengangguran yang digunakan merupakan tingkat pengangguran terbuka di 10 provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2011-2019 dalam satuan persen.
2. Pertumbuhan ekonomi (PE) dalam penelitian ini adalah laju pertumbuhan PDRB harga konstan 2010 menurut lapangan usaha, adapun data pertumbuhan ekonomi yang digunakan merupakan laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut lapangan usaha di 10 provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2011-2019 dalam bentuk persen.
3. Tingkat Inflasi (INF) dalam penelitian ini adalah kenaikan dari harga-harga barang dan jasa secara menyeluruh yang dapat dihitung dari indeks harga konsumen (IHK), adapun data tingkat inflasi yang digunakan merupakan

inflasi umum tahunan (Yoy) di 10 ibukota provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2011-2019 dalam bentuk persen.

4. Upah minimum provinsi (UMP) dalam penelitian ini adalah nilai upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi setiap tahunnya, adapun data upah minimum yang digunakan merupakan UMP di 10 provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2011-2019 dalam satuan Rupiah dan diubah dalam bentuk logaritma natural.
5. Tingkat Pendidikan (TPD) dalam penelitian ini adalah rata-rata lama sekolah (RLS), yaitu jumlah tahun standar yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menamatkan jenjang pendidikan secara formal (SD = 6 tahun; SMP = 9 tahun; SMA = 12 tahun; D1/D2 = 14 tahun; D3 = 15 tahun; D4 = 16 tahun; S1 = 17 tahun; S2 = 19 tahun; S3 = 22 tahun), adapun data tingkat pendidikan yang digunakan merupakan RLS di 10 provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2011-2019 dalam satuan tahun.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah berupa data panel, gabungan antara data *cross section* (10 provinsi di Sumatera) dengan data *time series* (2011-2019). Sumber data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang dipakai dalam mengumpulkan data penelitian ini, yaitu menggunakan metode dokumentasi, dengan cara menelusuri dan mendokumentasikan data-data dari situs resmi Badan pusat Statistik.

3.5 Metode Analisis

A. Estimasi Regresi Data Panel

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini merupakan analisis regresi data panel. Dimana data panel adalah sebuah data gabungan antara data *time series* dengan data *cross section*. Unit *cross section* dalam penelitian sebanyak 10 objek yang diwakilkan dari 10 provinsi di Pulau Sumatera. Sementara itu, data *time series* yang digunakan adalah 9 (sembilan) tahun terakhir, dari tahun 2011-2019. Sehingga total unit observasi data panel dalam penelitian ini, yaitu $NT = 90$ unit observasi.

Adapun persamaan regresi data panel di dalam penelitian ini yaitu dalam model semi log (Ln), sebab dalam penelitian ini beberapa data pada variabel bebas memiliki perbedaan satuan dan besaran sehingga persamaan regresinya harus dibuat dengan model semi logaritma natural untuk memperhalus dan untuk mempermudah melihat respon dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka persamaan regresi data panel dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$TPT_{it} = \alpha + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 LnUMP_{it} + \beta_4 TPD_{it} + \mu_{it}$$

Dimana :

- TPT_{it} = Tingkat pengangguran terbuka
- α = Konstanta

- β_{1-4} = Koefisien regresi
- PE_{it} = Pertumbuhan ekonomi provinsi i pada tahun t
- INF_{it} = Inflasi provinsi i pada tahun t
- $\ln UMP_{it}$ = Logaritma natural UMP provinsi i pada tahun t
- TPD_{it} = Tingkat pendidikan provinsi i pada tahun t
- μ_{it} = *Error* atau variabel pengganggu

Ada beberapa model analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis data panel pada penelitian ini, yaitu *common effect model (CEM)*, *fixed effect model (FEM)*, dan *random effect model (REM)*. Di dalam menentukan model analisis mana yang akan digunakan pada penelitian ini, maka harus dilakukan beberapa pengujian terlebih dahulu, seperti Uji *Chow*, Uji *Housman* dan Uji *Lagrange Multiplier*.

B. Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Dalam regresi data panel terdapat tiga model yang digunakan. Model yang digunakan dalam regresi data panel, yaitu *common effect model (OLS pooled)*, *fixed effect model (LSDV)*, dan *random effect model* (Gujarati, 2013).

1) *Common Effect Model*

Common Effect Model merupakan jenis model yang cukup sederhana dimana menggabungkan seluruh data *time series* dan data *cross section*, setelah itu akan dilakukan estimasi model dengan menggunakan *Ordinary Least Square (OLS)*. Dalam model ini menganggap bahwa intersep dan slope pada setiap variabel sama untuk setiap obyek observasi. Jadi dapat dikatakan, bahwa hasil regresi ini dianggap berlaku untuk semua tempat dan pada semua waktu. Jika

diasumsikan bahwa nilai α dan β tetap untuk setiap data time series dan cross section, maka estimasi model persamaan *common effect model* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \mu_{it}$$

Dimana:

- α = intersep gabungan
- β = koefisien slope

2) *Fixed Effect Model*

Fixed Effect Model dalam model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari intersepnya. Dalam mengestimasi model *fixed effect* maka perlu menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar individu. Dalam *fixed effect model* memberikan asumsi bahwa koefisien regresi (slope) tetap baik antar individu dan antar waktu. Adapun model estimasi persamaan *fixed effect model* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = (\alpha_0 + \alpha_i) + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \mu_{it}$$

Dimana:

- α_0 = intersep gabungan
- α_i = intersep individu i
- i = individu (1,2,...,N)
- t = time series (1,2,...,T)

3) *Random Effect Model*

Dalam model *random effect* mengasumsikan bahwa dalam data panel terdapat variabel gangguan yang mana nilainya berbeda antar individu. Model *random effect* hampir memiliki kesamaan dengan model *common effect* tetapi pada *random effect* ditambah nilai residu. Maka pada *random effect model* dapat diasumsikan bahwa intersep ataupun slope adalah sama baik antar waktu ataupun individu, dan ditambah nilai residu yang berbeda antar waktu. Adapun model estimasi persamaan *Random effect model* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = (\alpha_0 + \alpha_i) + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + w_{it}$$

Dimana:

- w_{it} = suku *error* gabungan ($\varepsilon_i + \mu_{it}$)
- ε_i = *error cross section*
- μ_{it} = *error cross section* dan *time series*

C. Uji Kesesuaian Model

Dalam menentukan sebuah model yang tepat yang akan digunakan pada penelitian ini, maka harus dilakukan beberapa pengujian yang dilakukan sebagai berikut:

1) Uji Chow (*Chow Test*)

Uji Chow adalah pengujian yang dilakukan guna untuk memilih model mana yang sesuai antara *common effect model* atau *fixed effect model* yang paling tepat untuk digunakan dalam mengestimasi data panel. Adapun hipotesis dalam uji Chou, yaitu:

- H_0 : *Common effect model*
- H_a : *Fixed effect model*

Tingkat error (α) adalah sebesar 5%. Adapun kriteria dalam menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak, yaitu apabila nilai dari Probabilitas $< 0,05$ maka H_a diterima, artinya model yang akan dipilih adalah *fixed effect model*. Namun sebaliknya, bila nilai Probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima, artinya model yang akan dipilih adalah *common effect model*. Jika model yang dipilih yaitu *fixed effect model* maka harus dilakukan pengujian lagi, yaitu Uji Hausman untuk mengetahui model mana yang terbaik untuk digunakan nanti apakah *fixed effect model* atau *random effect model*.

2) Uji Hausman (*Hausman Test*)

Uji Hausman digunakan dalam menentukan model mana paling tepat digunakan apakah *fixed effect model* atau *random effect model*. Adapun hipotesis dalam uji hausman sebagai berikut:

- H_0 : *Random effect model*
- H_a : *Fixed effect model*

Tingkat error (α) adalah sebesar 5%. Adapun kriteria dalam menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak, yaitu apabila nilai Probabilitas $< 0,05$ maka H_a diterima, artinya model yang akan dipilih adalah *fixed effect*. Namun sebaliknya, bila nilai Probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima, artinya model yang akan dipilih adalah *random effect*. Jika model yang dipilih adalah *random effect*, maka kita harus melakukan pengujian lagi dengan uji *Lagrange Multiplier*. Sebaliknya, jika model yang dipilih adalah *fixed effect* maka uji *Lagrange Multiplier* tak perlu dilakukan.

3) Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Uji *Lagrange multiplier* digunakan dalam penelitian untuk menentukan model mana paling tepat yang akan digunakan apakah *common effect model* (CEM) atau *random effect model* (REM). Adapun hipotesis uji lagrange multiplier sebagai berikut:

- H_0 : *Common Effect Model*
- H_a : *Random Effect Model*

Tingkat error (α) adalah sebesar 5%. Adapun kriteria dalam menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak, yaitu apabila nilai dari Probabilitas $< 0,05$ maka H_a diterima, artinya model yang akan dipilih adalah *random effect model*. Namun jika nilai Probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima, artinya model yang akan dipilih adalah *common effect model*.

D. Pengujian Statistik

Dalam menentukan tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel bebas terhadap variabel terikat, maka perlu dilakukan pengujian statistik, meliputi uji koefisien determinasi (R^2), Uji F, dan Uji t.

1) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) adalah suatu ukuran yang menjelaskan besar variasi variabel terikat (Y) yang mampu dijelaskan oleh variabel bebas (X1, X2, X3, dan X4). Jika pada nilai R^2 mendekati 1 atau = 1, maka varian variabel tingkat pengangguran terbuka mampu dijelaskan secara keseluruhan oleh variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum provinsi, dan tingkat pendidikan dengan kata lain garis regresi mampu menjelaskan 100% variasi pada variabel terikat (Y). Sebaliknya jika nilai $R^2 = 0$, maka dapat dikatakan bahwa variasi

tingkat pengangguran terbuka tidak mampu dijelaskan sama sekali oleh variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum regional, dan tingkat pendidikan.

2) Uji F Statistik

Uji F adalah pengujian yang dilakukan guna untuk melihat pengaruh dari variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4) secara keseluruhan atau secara simultan terhadap variabel terikat (Y). Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Adapun hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

- $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$
- $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$

Dalam menentukan hipotesis mana yang dapat diterima dan ditolak, maka penentuan hipotesis dapat kita lakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas dengan nilai α . Jika nilai Probabilitas $< 0,05$, maka H_a diterima, artinya bahwa terdapat pengaruh secara simultan dari variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4) terhadap variabel terikat (Y). Namun, jika nilai Probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima, artinya bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan dari variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4) terhadap variabel terikat (Y).

3) Uji t Statistik

Uji t adalah pengujian yang dilakukan secara parsial pada masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Dimana dalam uji t ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari suatu variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat secara individual. Adapun hipotesis yang akan digunakan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hipotesis 1:

- $H_0 : \beta_1 \geq 0$ (Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran)
- $H_a : \beta_1 < 0$ (Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran)

Hipotesis 2:

- $H_0 : \beta_2 \geq 0$ (Inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran)
- $H_a : \beta_2 < 0$ (Inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran)

Hipotesis 3:

- $H_0 : \beta_3 \leq 0$ (Upah minimum provinsi tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran)
- $H_a : \beta_3 > 0$ (Upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran)

Hipotesis 4:

- $H_0 : \beta_4 \geq 0$ (Tingkat pendidikan tidak berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran)
- $H_a : \beta_4 < 0$ (Tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran)

Dalam menentukan hipotesis mana yang diterima dan ditolak, maka penentuan hipotesis dapat kita lakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas dengan nilai signifikansi ($\alpha = 0,05$). Jika nilai Probabilitas $< 0,05$, maka H_a diterima, artinya terdapat pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat (Y). Namun apabila nilai Probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat (Y).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

A. Profil Pulau Sumatera

Secara geografis Pulau Sumatera terletak di bagian barat gugusan Kepulauan Indonesia. Di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan di sebelah barat dengan Samudera Hindia. Secara astronomis Pulau Sumatera terletak antara 6°LU-6°LU serta antara 95°BB-109°BT.



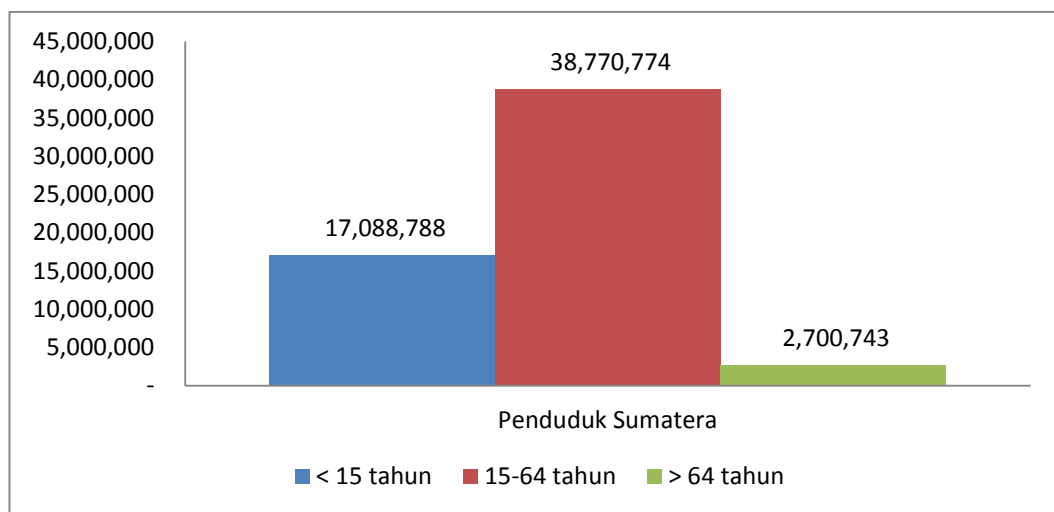
Gambar 4.1 Peta Pulau Sumatera

Sumber : KemenPUPR (2017)

Pada Gambar 4.1 Pulau Sumatera merupakan pulau terbesar kedua di Indonesia dan terbesar keenam di dunia. Pulau Sumatera memiliki bentang luas wilayah mencapai $\pm 473.481 \text{ km}^2$ dan dibagi ke dalam sepuluh provinsi, terdiri dari Provinsi Aceh seluas 58.377 km^2 , Sumatera Utara 72.981 km^2 , Sumatera

Barat 42.013 km², Riau 87.024 km², Jambi 50.160 km², Sumatera Selatan 91.591 km², Bengkulu 19.919 km², Lampung 35.376 km², Kepulauan Bangka Belitung 16.424 km², dan Kepulauan Riau 8.202 km² (KemenPUPR, 2017).

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), Pulau Sumatera memiliki sebaran jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia yaitu sebanyak 58,56 juta jiwa atau sebanyak 21,68 persen penduduk Indonesia.



Gambar 4.2 Jumlah penduduk Pulau Sumatera menurut kelompok umur (2019)
 Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 4.2 menunjukkan jumlah penduduk di Pulau Sumatera menurut kelompok umur pada tahun 2019. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 Pulau Sumatera sudah mengalami bonus demografi, dimana sebanyak 66 persen atau 38.770.774 jiwa penduduk di Pulau Sumatera masuk ke dalam penduduk usia produktif (15-64 tahun). Sementara, 33 persen atau 19.789.531 jiwa penduduk di Pulau Sumatera masuk ke dalam penduduk usia tidak produktif (<15 atau >64 tahun).

B. Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Sumatera

Secara umum, pengangguran merupakan kondisi seseorang yang masuk dalam angkatan kerja namun belum mendapatkan pekerjaan tetapi secara aktif berusaha mencari pekerjaan. Menurut McChonnell, dkk (2006) pengangguran adalah seseorang yang sudah berusia 16 tahun ke atas, masuk dalam angkatan kerja dan sudah siap untuk bekerja, namun belum mendapatkan pekerjaan tetapi secara aktif telah terlibat dalam mencari pekerjaan selama 4 minggu. Di Indonesia parameter pengangguran diukur melalui tingkat pengangguran terbuka yang mana hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama untuk digunakan sejak tahun 2000 (Tukiran, 2014).

Tabel 4.1 Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera periode 2011-2019 (persen)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	9	9.06	10.12	9.02	9.93	7.57	6.57	6.34	6.17
Sumatera Utara	8.18	6.28	6.45	6.23	6.71	5.84	5.6	5.55	5.39
Sumatera Barat	8.02	6.65	7.02	6.5	6.89	5.09	5.58	5.66	5.38
Riau	6.09	4.37	5.48	6.56	7.83	7.43	6.22	5.98	5.76
Jambi	4.63	3.2	4.76	5.08	4.34	4	3.87	3.73	4.06
Sumatera Selatan	6.6	5.66	4.84	4.96	6.07	4.31	4.39	4.27	4.53
Bengkulu	3.46	3.62	4.61	3.47	4.91	3.3	3.74	3.35	3.26
Lampung	6.38	5.2	5.69	4.79	5.14	4.62	4.33	4.04	4.03
Kep. Bangka Belitung	3.86	3.43	3.65	5.14	6.29	2.6	3.78	3.61	3.58
Kep. Riau	5.38	5.08	5.63	6.69	6.2	7.69	7.16	8.04	7.5

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Dilihat pada Tabel 4.1 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2011 sampai tahun 2019. Pada tahun 2011 tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi di Provinsi Aceh sebesar 9 persen dan diikuti Provinsi Bengkulu dengan tingkat pengangguran terendah sebesar 3,46 persen. Sementara itu, pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka tertinggi masih di Provinsi Aceh yaitu sebesar 6,17 persen dan tingkat pengangguran terendah masih di Provinsi Bengkulu dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,26 persen. Selama kurun waktu 2011-2019 tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera terus mengalami naik turun, bahkan kenaikan tingkat pengangguran terparah terjadi pada tahun 2013 dan 2015, dimana kenaikan tingkat pengangguran hampir terjadi diseluruh provinsi di Pulau Sumatera. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera pada tahun 2016-2019 sudah membaik dari pada tahun sebelumnya, dimana trend negatif hampir terjadi diseluruh provinsi di Pulau Sumatera.

C. Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera

Menurut Samuelson & Nordhaus (1992) pertumbuhan ekonomi adalah suatu gambaran dari perkembangan sebuah kegiatan dalam suatu perekonomian negara/daerah. Dimana barang maupun jasa yang diproduksi di dalam masyarakat meningkat, atau juga pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan batas kemungkinan produksi (*PPF*) suatu negara/daerah.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran yang paling menonjol dalam pengukuran pembangunan suatu wilayah. Prestasi perekonomian diukur melalui peningkatan kemampuan suatu wilayah dalam

menghasilkan barang dan jasa dibandingkan dengan periode berikutnya. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dapat memicu peningkatan jumlah produksi yang berdampak pada tingginya permintaan tenaga kerja. Oleh karena itu, banyak pandangan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dengan penyerapan tenaga kerja atau dengan kata lain terjadinya kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi tingkat pengangguran pada suatu wilayah.

Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB menurut harga konstan. Berikut Tabel 4.3 laju pertumbuhan ekonomi di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2011 sampai tahun 2019.

Tabel 4.2 Laju pertumbuhan ekonomi (PDRB Adhk 2010) menurut provinsi di Pulau Sumatera periode 2011-2019 (Persen)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	3.28	3.85	2.61	1.55	-0.73	3.29	4.18	4.61	4.15
Sumatera Utara	6.66	6.45	6.07	5.23	5.1	5.18	5.12	5.18	5.22
Sumatera Barat	6.34	6.31	6.08	5.88	5.53	5.27	5.3	5.16	5.05
Riau	5.57	3.76	2.48	2.71	0.22	2.18	2.66	2.37	2.84
Jambi	7.86	7.03	6.84	7.36	4.21	4.37	4.6	4.74	4.4
Sumatera Selatan	6.36	6.83	5.31	4.79	4.42	5.04	5.51	6.04	5.71
Bengkulu	6.85	6.83	6.07	5.48	5.13	5.28	4.98	4.99	4.96
Lampung	6.56	6.44	5.77	5.08	5.13	5.14	5.16	5.25	5.27
Kep. Bangka B	6.9	5.5	5.2	4.67	4.08	4.1	4.47	4.46	3.32
Kep. Riau	6.96	7.63	7.21	6.6	6.02	4.98	1.98	4.58	4.89

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Pada Tabel 4.2 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2011-2019. Selama kurun waktu sembilan tahun terakhir yakni dari tahun 2011-2019, pertumbuhan ekonomi di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera terus mengalami naik turun. Tercatat bahwa pada tahun 2013 dan 2015 hampir semua pertumbuhan ekonomi di provinsi di Pulau Sumatera mengalami penurunan. Pada tahun 2015 penurunan laju pertumbuhan ekonomi terparah yakni di Provinsi Aceh yang mengalami kontraksi sebesar -0,73 persen dan disusul Provinsi Riau dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,22 persen. Sementara itu, dalam satu tahun terakhir yakni pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera yaitu di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,71 persen, selanjutnya diikuti Provinsi Lampung sebesar 5,27 persen, dan Provinsi Sumatera Utara 5,22 persen. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2019 yakni di Provinsi Riau sebesar 2,84 persen, selanjutnya diikuti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,32 persen, dan Provinsi Aceh sebesar 4,15 persen.

D. Tingkat Inflasi di Pulau Sumatera

Inflasi merupakan perkembangan dari kenaikan harga-harga barang serta jasa secara menyeluruh dan berlangsung secara terus menerus, jika terjadi kenaikan pada satu dan dua barang, itu belum dapat dikatakan sebagai inflasi, kecuali jika harga barang tersebut merembet pada harga barang yang lainnya. Menurut Badan Pusat Statistik (2021) inflasi adalah kecenderungan dari naiknya tingkatan harga barang dan jasa secara keseluruhan yang berlangsung secara terus menerus.

Menurut Samuelson (1992) inflasi adalah gambaran dari kenaikan dalam tingkat harga secara umum. Sementara itu untuk mengukur perubahan dari tingkat harga secara umum dapat diukur melalui laju inflasi atau tingkat inflasi. Dalam mengukur sebuah laju inflasi biasanya diukur dengan cara menggunakan indeks harga konsumen (IHK).

Tabel 4.3 Laju Inflasi umum (*Yoy*) di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera periode 2011-2019 (persen)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	3.32	0.06	6.39	7.83	1.27	3.13	4.86	1.93	1.38
Sumatera Utara	3.54	3.79	10.09	8.24	3.32	6.6	3.18	1	2.46
Sumatera Barat	5.37	4.16	10.87	11.9	0.85	5.02	2.11	2.55	1.73
Riau	5.09	3.35	8.83	8.53	2.71	4.19	4.07	2.54	2.56
Jambi	2.76	4.22	8.74	8.72	1.37	4.54	2.68	3.02	1.27
Sumatera Selatan	3.78	2.72	7.04	8.38	3.05	3.68	2.85	2.78	2.05
Bengkulu	3.96	4.61	9.94	10.85	3.25	5	3.56	2.35	2.88
Lampung	4.24	4.3	7.56	8.36	4.65	2.75	3.14	2.92	3.48
Kep. Bangka Belitung	5	6.57	8.71	6.81	4.66	7.78	2.66	3.45	2.32
Kep. Riau	3.32	3.92	10.09	7.49	2.46	3.06	3.37	2.36	2.4

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Dilihat pada Tabel 4.3 menunjukkan laju inflasi di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2011 hingga tahun 2019. Pada tahun 2011 dan 2012 laju inflasi di Pulau Sumatera masih tergolong inflasi ringan atau berada dibawah 10 persen. Sementara, pada tahun 2013 dan 2014 laju inflasi di Pulau Sumatera mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya, dan bahkan beberapa provinsi

di Pulau Sumatera memiliki laju inflasi berada di atas 10 persen atau tergolong inflasi sedang. Tercatat bahwa pada tahun 2013 laju inflasi di Provinsi Sumatera Barat sebesar 10,87 persen, Provinsi Sumatera Utara sebesar 10,09 persen, dan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 10,09 persen. Selanjutnya, pada tahun 2014 provinsi yang memiliki laju inflasi di atas 10 persen yakni provinsi Sumatera Barat dengan laju inflasi sebesar 11,9 persen dan diikuti Provinsi Bengkulu sebesar 10,85 persen. Sementara itu, pada tahun 2015 hingga tahun 2019 laju inflasi di Pulau Sumatera selalu berada di bawah 10 persen atau masuk ke dalam inflasi ringan, dan bahkan dari tahun 2017 sampai 2019 laju inflasi di seluruh provinsi di Pulau Sumatera berada di bawah 5 persen.

E. Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera

Upah merupakan suatu bayaran yang diterima oleh seorang pekerja atas jasa yang telah diberikan pekerja tersebut. Pada dasarnya besaran tingkat upah yang diterima oleh pekerja masing-masing berbeda, sesuai pada jenis pekerjaan yang dilakukan dan perjanjian yang telah disepakati.

Di Indonesia kebijakan pengupahan diatur dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah upaya dalam mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu kebijakan pengupahan di Indonesia, yaitu upah minimum. Upah minimum merupakan upah bulan terendah yang meliputi upah pokok dan tunjangan tetap. Berdasarkan PP No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, upah minimum terdiri dari upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten, dimana besaran upah minimum pada setiap daerah masing-masing berbeda.

Tabel 4.4 Perkembangan upah minimum provinsi (UMP) sepuluh provinsi di Pulau Sumatera periode 2011-2019 (ribu Rupiah)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	1,350	1,400	1,550	1,750	1,900	2,119	2,500	2,718	2,936
Sumatera Utara	1,036	1,200	1,375	1,506	1,625	1,812	1,961	2,132	2,303
Sumatera Barat	1,055	1,150	1,350	1,490	1,615	1,801	1,949	2,119	2,289
Riau	1,120	1,238	1,400	1,700	1,878	2,095	2,266	2,464	2,662
Jambi	1,028	1,143	1,300	1,502	1,710	1,907	2,063	2,244	2,424
Sumatera Selatan	1,048	1,195	1,630	1,825	1,974	2,206	2,388	2,596	2,804
Bengkulu	815	930	1,200	1,350	1,500	1,605	1,730	1,889	2,040
Lampung	855	975	1,150	1,399	1,581	1,763	1,908	2,075	2,241
Kep. Bangka Belitung	1,024	1,110	1,265	1,640	2,100	2,342	2,534	2,755	2,977
Kep. Riau	975	1,015	1,365	1,665	1,954	2,179	2,358	2,564	2,770

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kemnaker

Pada Tabel 4.4 menunjukkan perkembangan upah minimum provinsi (UMP) di Pulau Sumatera dari tahun 2011-2019. Dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir perkembangan upah minimum provinsi (UMP) di Pulau Sumatera terus mengalami kenaikan. Tercatat pada tahun 2019 UMP tertinggi yaitu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 2.976.705, Provinsi Aceh sebesar Rp 2.935.985, Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 2.804.453, Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 2.769.754, Provinsi Riau sebesar Rp 2.662.025, Provinsi Jambi sebesar Rp 2.423.899, Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp

2.303.403, Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 2.289.228, Provinsi Lampung sebesar Rp 2.241.269, dan Provinsi Bengkulu sebesar Rp 2.040.407.

F. Tingkat Pendidikan di Pulau Sumatera

Salah satu indikator dalam menghitung tingkat pendidikan dapat dihitung melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Menurut Badan Pusat Statistik Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Adapun kelebihan dalam menggunakan RLS, yaitu RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Berikut pada Tabel 4.6 menunjukkan perkembangan tingkat pendidikan di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera yang diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Tabel 4.5 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera periode 2011-2019 (tahun)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	8.32	8.36	8.44	8.71	8.77	8.86	8.98	9.09	9.18
Sumatera Utara	8.61	8.72	8.79	8.93	9.03	9.12	9.25	9.34	9.45
Sumatera Barat	8.2	8.27	8.28	8.29	8.42	8.59	8.72	8.76	8.92
Riau	8.29	8.34	8.38	8.47	8.49	8.59	8.76	8.92	9.03
Jambi	7.48	7.69	7.8	7.92	7.96	8.07	8.15	8.23	8.45
Sumatera Selatan	7.42	7.5	7.53	7.66	7.77	7.83	7.99	8	8.18
Bengkulu	7.93	8.01	8.09	8.28	8.29	8.37	8.47	8.61	8.73
Lampung	7.28	7.3	7.32	7.48	7.56	7.63	7.79	7.82	7.92
Kep. Bangka B	7.19	7.25	7.32	7.35	7.46	7.62	7.78	7.84	7.98
Kep. Riau	9.46	9.58	9.63	9.64	9.65	9.67	9.79	9.81	9.99

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Dilihat pada Tabel 4.5 menunjukkan perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2011 sampai tahun 2019. Selama kurun waktu sembilan tahun terakhir perkembangan RLS di Pulau Sumatera mengalami kenaikan setiap tahunnya atau terjadi trend positif. Tercatat juga bahwa pada tahun 2019 Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yaitu di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 9,99 tahun , diikuti Provinsi Utara sebesar 9,45 tahun, Provinsi Aceh sebesar 9,18 tahun, Provinsi Sumatera Riau sebesar 9,03 tahun, Provinsi Kepulauan Sumatera Barat sebesar 8,92 tahun, Provinsi Bengkulu sebesar 8,73 tahun, Provinsi Jambi sebesar 8,45 tahun, Provinsi Sumatera Selatan sebesar 8,18 tahun, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 7,98 tahun, dan yang terakhir yaitu di Provinsi Sumatera Selatan dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,92 tahun.

4.1.2 Hasil Perhitungan dan Interpretasi Data

A. Pemilihan Model Regresi

Dalam penelitian ada beberapa model analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis data panel pada penelitian ini, yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Di dalam menentukan model analisis mana yang akan digunakan pada penelitian ini, maka harus dilakukan pengujian terlebih dahulu, yaitu Uji *Chow*, Uji *Housman* dan Uji *Lagrange Multiplier*.

1) Uji Chow (*Chow Test*)

Uji Chow merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan model mana yang akan dipilih antara *common effect model* atau *fixed effect model*. Adapun hipotesis dalam uji Chow sebagai berikut:

- H_0 : *Common effect model*
- H_a : *Fixed effect model*

Tingkat error (α) adalah sebesar 5% (0,05). Adapun kriteria dalam menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak, yaitu apabila nilai *Prob Cross-section Chi-square* $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Namun sebaliknya, bila nilai *Prob Cross-section Chi-square* $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Tabel 4.6 Uji Chow (*Chow Test*) dengan *Redundant Test*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	19,7983	(9.76)	0,0000
Cross-section Chi-square	108,66	9	0,0000

Sumber: *Eviews9, 2021 (data diolah)*

Berdasarkan hasil uji chow diperoleh nilai *Prob Cross-section Chi-square*, yaitu $0,0000 < 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya model terbaik yang dipilih dalam uji chow yaitu *fixed effect model* (FEM).

2) Uji Hausman (Hausman Test)

Uji Hausman digunakan dalam menentukan model mana paling tepat digunakan apakah *fixed effect model* atau *random effect model*. Adapun hipotesis dalam uji hausman sebagai berikut:

- H_0 : *Random effect model*
- H_a : *Fixed effect model*

Tingkat *error* (α) adalah sebesar 5%. Adapun kriteria dalam menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak, yaitu apabila nilai *Prob* $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Namun sebaliknya, bila nilai *Prob* $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Tabel 4.7 Uji Hausman (*Hausman Test*)

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	37,06844	4	0,0000

Sumber: *Eviews9 (data diolah)*

Berdasarkan hasil uji hausman diperoleh nilai prob, yaitu $0,0000 < 0,05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya model terbaik yang dipilih dalam uji hausman yaitu *fixed effect model* (FEM).

B. Interpretasi Model Regresi *Fixed Effect Model*

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada uji *Chow* dan *Hausman*, model terbaik yang dipilih adalah *fixed effect model* (FEM).

Tabel 4.8 *Fixed Effect Model* (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20,5601	5,61820	3,65955	0,0005
PE?	-0,34827	0,09076	-3,83739	0,0003
INF?	-0,04576	0,03307	-1,38346	0,1706
LnUMP?	1,62115	0,76679	2,11419	0,0378
TPD?	-4,33947	0,87921	-4,93564	0,0000
<i>Fixed Effects (Cross)</i>				
_KEPRI--C	6,94256			
_SUMUT--C	3,846475			
_ACEH--C	3,297431			
_SUMBAR--C	1,653581			
_RIAU--C	0,714929			
_BENGKULU--C	-1,498443			
_JAMBI--C	-2,795108			
_SUMSEL--C	-3,090038			
_LAMPUNG--C	-3,701642			
_KEPBABEL--C	-5,369745			
R-squared	0,82924			
Adjusted R-squared	0,80003			
Prob(F-statistic)	0,0000			

Sumber: *Eviews9, 2021 (data diolah)*

Berdasarkan pada Tabel 4.8 hasil perhitungan data panel menggunakan model regresi *fixed effect model* diperoleh persamaan regresinya dan diinterpretasikan sebagai berikut:

$$TPT = 20,5601 - 0,3482PE - 0,0457INF + 1,6211LnUMP - 4,3394TPD$$

- a. Nilai konstanta (α) yakni 20,5601, artinya jika semua variabel independen (pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum provinsi, dan tingkat pendidikan) diasumsikan sama dengan 0 (nol), maka tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera adalah sebesar 20,56 persen.
- b. Nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi sebesar -0,3482, artinya setiap terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen maka tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera akan mengalami penurunan sebesar 0,34 persen.
- c. Nilai koefisien regresi variabel inflasi sebesar -0,0457, artinya setiap terjadi kenaikan inflasi sebesar 1 persen maka tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera akan mengalami penurunan sebesar 0,04 persen.
- d. Nilai koefisien regresi variabel upah minimum provinsi sebesar 1,6211, artinya setiap terjadi kenaikan upah minimum provinsi sebesar 1 persen maka tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera akan mengalami kenaikan sebesar 1,62 persen.
- e. Nilai koefisien regresi variabel tingkat pendidikan sebesar -4,3394, artinya setiap terjadi kenaikan tingkat pendidikan sebesar 1 tahun maka tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera akan mengalami penurunan sebesar 4,33 persen.

Pada Tabel 4.8 memperlihatkan nilai intersep untuk masing-masing provinsi di Pulau Sumatera. Adapun persamaan model regresi untuk masing-masing individu (provinsi) dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{TPT_KEPRI} = 27,502 - 0,3482\text{PE} - 0,0457\text{INF} + 1,6211\text{LnUMP} - 4,3394\text{TPD}$$

$$\text{TPT_SUMUT} = 24,406 - 0,3482\text{PE} - 0,0457\text{INF} + 1,6211\text{LnUMP} - 4,3394\text{TPD}$$

$$\text{TPT_ACEH} = 23,857 - 0,3482\text{PE} - 0,0457\text{INF} + 1,6211\text{LnUMP} - 4,3394\text{TPD}$$

$$\text{TPT_SUMBAR} = 22,213 - 0,3482\text{PE} - 0,0457\text{INF} + 1,6211\text{LnUMP} - 4,3394\text{TPD}$$

$$\text{TPT_RIAU} = 21,301 - 0,3482\text{PE} - 0,0457\text{INF} + 1,6211\text{LnUMP} - 4,3394\text{TPD}$$

$$\text{TPT_BENGKULU} = 19,062 - 0,3482\text{PE} - 0,0457\text{INF} + 1,6211\text{LnUMP} - 4,3394\text{TPD}$$

$$\text{TPT_JAMBI} = 17,585 - 0,3482\text{PE} - 0,0457\text{INF} + 1,6211\text{LnUMP} - 4,3394\text{TPD}$$

$$\text{TPT_SUMSEL} = 17,470 - 0,3482\text{PE} - 0,0457\text{INF} + 1,6211\text{LnUMP} - 4,3394\text{TPD}$$

$$\text{TPT_LAMPUNG} = 16,859 - 0,3482\text{PE} - 0,0457\text{INF} + 1,6211\text{LnUMP} - 4,3394\text{TPD}$$

$$\text{TPT_KEPBABEL} = 15,191 - 0,3482\text{PE} - 0,0457\text{INF} + 1,6211\text{LnUMP} - 4,3394\text{TPD}$$

Pada hasil regresi data panel melalui pendekatan FEM dengan penduga LSDV, adapun nilai intersep yang dihasilkan untuk masing-masing individu (provinsi) adalah berbeda-beda, sedangkan nilai slope tetap sama. Hal ini membuktikan bahwa asumsi yang digunakan untuk FEM, yaitu intersep α_i berbeda antar individu, tetapi slope β tetap sama antar individu dan antar waktu telah terpenuhi. Perbedaan nilai intersep menunjukkan bahwa setiap unit/individu (provinsi) mempunyai nilai tingkat pengangguran terbuka yang berbeda-beda dan nilai slope menunjukkan besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera.

Pada persamaan model unit/individu dapat dilihat bahwa besarnya tingkat pengangguran terbuka untuk masing-masing provinsi di Pulau Sumatera tidaklah sama. Dari 10 individu (provinsi) terdapat 5 individu yang memiliki nilai intersep di atas intersep gabungan (20,5601), yaitu Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan Riau. Sementara itu, 5 individu (provinsi) lainnya yang memiliki nilai intersep di bawah intersep gabungan, yaitu Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan persamaan model unit/individu tingkat pengangguran terbuka terbesar adalah Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai intersep sebesar 27,502 dan terendah adalah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 15,191. Sehingga dapat diartikan bahwa jika semua variabel independen (pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum, dan tingkat pendidikan) diasumsikan sama dengan nol atau tidak berubah, maka tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan

Riau adalah sebesar 27,5 persen, dan untuk tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 15,19 persen.

C. Pengujian Hipotesis

Dalam menentukan tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel independen (pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum provinsi, dan tingkat pendidikan) terhadap variabel dependen (tingkat pengangguran terbuka), maka perlu dilakukan pengujian statistik, meliputi uji koefisien determinasi (R^2), Uji F, dan Uji t.

1) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) merupakan suatu ukuran yang menjelaskan besar variasi variabel dependen (tingkat pengangguran terbuka) yang mampu dijelaskan oleh variabel independen (pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum provinsi, dan tingkat pendidikan).

Dari hasil regresi *fixed effect model* (FEM) diperoleh nilai *R-squared* (R^2) sebesar 0,82924, artinya bahwa sebanyak 82 persen variabel tingkat pengangguran terbuka mampu dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum provinsi, dan tingkat pendidikan. Sementara itu, sisanya sebanyak 18 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

2) Uji F

Uji F adalah pengujian yang dilakukan guna untuk melihat pengaruh dari variabel bebas (pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum provinsi, dan tingkat pendidikan) secara keseluruhan atau secara simultan terhadap variabel

terikat (tingkat pengangguran terbuka). Tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5% ($\alpha = 0,05$).

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai Prob (F-statistic) sebesar $0,0000 < 0,05$, artinya dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum provinsi, dan tingkat pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka.

3) Uji t

Uji t adalah pengujian yang dilakukan secara parsial atau secara mandiri pada masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Di mana dalam uji t ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari suatu variabel bebas (pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum provinsi, dan tingkat pendidikan) secara parsial dalam menerangkan variasi variabel terikat (tingkat pengangguran terbuka). Tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Pada hasil regresi *fixed effect model* diketahui nilai probabilitas dari masing-masing variabel independen sebagai berikut:

- a. Pada variabel pertumbuhan ekonomi (PE) diperoleh nilai Prob sebesar $0,0003 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_o ditolak, artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera.
- b. Pada variabel inflasi (INF) diperoleh nilai Prob sebesar $0,1706 > 0,05$, maka H_o diterima dan H_a ditolak, artinya inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera.

- c. Variabel upah minimum provinsi (LnUMP) diperoleh nilai Prob sebesar 0,0378 < 0,05, maka H_a diterima dan H_o ditolak, artinya upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera.
- d. Variabel tingkat pendidikan (TPD) diperoleh nilai Prob sebesar 0,0000 < 0,05, maka H_a diterima dan H_o ditolak, artinya tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera.

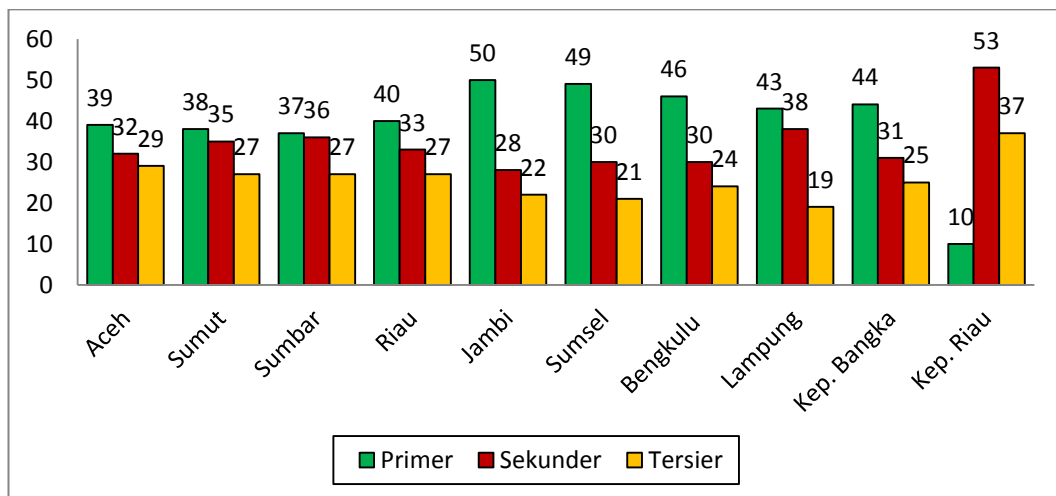
4.2 Pembahasan

1. Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Sumatera

Pada hasil regresi *fixed effect model* didapatkan nilai intersep yang dihasilkan untuk masing-masing provinsi adalah berbeda-beda. Perbedaan nilai intersep tersebut menunjukkan bahwa setiap Provinsi di Pulau Sumatera mempunyai nilai tingkat pengangguran terbuka yang tidaklah sama. Dari perbedaan intersep tersebut bahwa tingkat pengangguran terbuka terbesar di Pulau Sumatera selama periode 2011-2019 adalah di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 27,5 persen, diikuti Provinsi Sumatera Utara sebesar 24,4 persen, Provinsi Aceh sebesar 23,85 persen, Provinsi Sumatera Barat sebesar 22,21 persen, Provinsi Riau sebesar 21,3 persen, Provinsi Bengkulu sebesar 19,06 persen, Provinsi Jambi sebesar 17,58 persen, Provinsi Sumatera Selatan sebesar 17,47 persen, Provinsi Lampung sebesar 16,85 persen, dan terendah adalah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 15,19 persen.

Pada dasarnya terjadinya perbedaan tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera dapat dipengaruhi oleh variabel lain di luar model, seperti kondisi

daya serap lapangan pekerjaan dan kualitas SDM di masing-masing provinsi di Pulau Sumatera. Sebagai gambaran, pada lapangan pekerjaan sektor primer (pertanian dan pertambangan) umumnya tidak harus memiliki tingkat pendidikan dan *skill* yang tinggi, sementara pada sektor sekunder (lapangan pekerjaan industri pengolahan, listrik, gas dan air serta lapangan pekerjaan konstruksi/bangunan) dan sekunder (lapangan pekerjaan perdagangan, hotel, restoran dan akomodasi, lapangan pekerjaan angkutan, pergudangan dan telekomunikasi, lapangan pekerjaan keuangan dan jasa perusahaan serta lapangan pekerjaan jasa kemasyarakatan) umumnya cenderung membutuhkan tingkat pendidikan dan *skill* yang lebih tinggi.



Gambar 4.3 Penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera menurut sektor
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (data diolah)

Berdasarkan hal tersebut Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi dapat dipengaruhi oleh kondisi daya serap lapangan pekerjaan yang didominasi oleh sektor sekunder sebesar 53 persen, diikuti sektor tersier sebesar 37 persen, dan sektor primer hanya sebesar 10 persen. Sementara itu, jika kita kaitkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi

Kepulauan Riau berdasarkan pada kelompok pendidikan, dimana tingkat pengangguran terbuka tertinggi yaitu pada tamatan SMA/SMK sebesar 66,9 persen (Badan Pusat Statistik, 2019). Dapat kita tarik benang merah bahwa dalam proporsi yang cukup signifikan angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan SMA/SMK ternyata masih banyak belum terserap oleh lapangan pekerjaan. Hal ini dapat terjadi karena kualifikasi keterampilan lulusan SMA/SMK belum benar-benar memenuhi kebutuhan pasar kerja seperti perusahaan industri atau jasa sehingga hal tersebut yang membuatnya tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi di Kepulauan Riau.

Sementara itu, rendahnya tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Bangka Belitung dapat terjadi karena beberapa hal, seperti kondisi daya serap lapangan pekerjaan yang masih didominasi oleh sektor primer sebesar 44 persen, diikuti sektor sekunder sebesar 31 persen, dan sektor tersier sebesar 25 persen. Seperti yang kita ketahui menurut laporan Badan Pusat Statistik sektor lapangan usaha di Kepulauan Bangka Belitung seperti pertanian dan pertambangan banyak berada di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan. Sementara, lapangan usaha sekunder dan tersier seperti perusahaan semakin banyak berkembang di daerah perkotaan. Berdasarkan hal tersebut membuat penyerapan tenaga kerja di Kepulauan Bangka Belitung cukup tinggi sehingga hal tersebut menyebabkan rendahnya tingkat pengangguran. Selain itu, rendahnya tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Bangka Belitung juga didukung adanya kontribusi baik dari perempuan dalam pasar tenaga kerja. Menurut data Sakernas tahun 2018, pada sektor tersier proporsi tenaga kerja perempuan di Kepulauan Bangka Belitung lebih banyak dibandingkan laki-laki yaitu 58,52 persen (BPS, 2019).

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran

Pada hasil regresi *fixed effect model* menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera. Setiap terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen maka akan mengurangi tingkat pengangguran di Pulau Sumatera sebesar 0.34 persen. Hasil ini sesuai dengan hipotesa dalam penelitian ini, di mana terdapat pengaruh negatif antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Pulau Sumatera.

secara umum, kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran dari perkembangan sebuah kegiatan dalam suatu perekonomian wilayah. Di mana barang maupun jasa yang diproduksi di dalam masyarakat meningkat, atau juga pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan batas kemungkinan produksi (*PPF*) suatu wilayah (Samuelson & Nordhaus, 1992). Kenaikan produksi barang dan jasa yang digambarkan dalam pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan penggunaan tenaga kerja bertambah, sehingga ketika penggunaan tenaga kerja maka tingkat pengangguran di Pulau Sumatera akan mengalami penurunan. Namun sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi terjadi penurunan maka tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera akan mengalami kenaikan.

Jika dilihat secara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera selama periode 2011-2019 mengalami fluktuasi, tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 3,91 persen. Turunnya laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera pada tahun 2015 disebabkan oleh

beberapa faktor salah satunya turunnya harga komoditas pertanian, seperti harga CPO yang turun sekitar 30 persen dari 821 dollar per ton pada tahun 2014 menjadi 584 per ton pada tahun 2015. Melemahnya pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera juga memberikan dampak atas melambatnya daya serap tenaga kerja yang mengakibatkan tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera mengalami kenaikan sebesar 6,54 persen pada tahun 2015.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori Okun's Law yang menyatakan, bahwa terdapat hubungan terbalik antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran. Di mana jika GDP riil mengalami kenaikan maka tingkat pengangguran akan turun. Begitupun sebaliknya, jika GDP riil turun maka tingkat pengangguran akan mengalami kenaikan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Misini & Pantina (2017), dalam penelitiannya menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Negara Kosovo, di mana setiap 1 persen kenaikan pertumbuhan PDB nominal akan mengurangi tingkat pengangguran di Kosovo sebesar 0,43 persen. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan Soyly et al. (2018), dalam hasil penelitiannya menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Negara-negara Eropa Timur, di mana setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan PDB akan menurunkan tingkat pengangguran di Negara-negara Eropa Timur sebesar 0,08 persen.

3. Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran

Berdasarkan hasil regresi *fixed effect model* menunjukkan variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera, dimana nilai probabilitas yang didapat adalah $0,1706 > 0,05$.

Secara rata-rata perkembangan inflasi di Pulau Sumatera periode 2011-2019 masih tergolong inflasi ringan, yaitu di bawah 10 persen per tahun, bahkan kenaikan inflasi tertinggi di Pulau Sumatera terjadi pada tahun 2013 sebesar 8,82 persen. Kenaikan inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2013 disebabkan oleh naiknya biaya faktor produksi, seperti harga BBM dan tarif listrik sehingga mendorong naiknya harga pada komoditas lainnya.

Tabel 4.9 Perkembangan harga BBM (premium) di Pulau Sumatera (2011-2019)

Tahun	BBM	Persentase Perubahan	
2011	Rp 4500	0,0%	Tetap
2012	Rp 4500	0,0%	Tetap
2013	Rp 6500	44,4%	Naik
17/11/2014	Rp 8500	30,8%	Naik
01/01/2015	Rp7600	-10,6%	Turun
17/01/2015	Rp 6600	-13,2%	Turun
28/03/2015	Rp 7300	10,6%	Naik
05/01/2016	Rp 7050	-3,4%	Turun
01/04/2016	Rp 6550	-7,1%	Turun
15/02/2017	Rp 6550	0,0%	Tetap
28/07/2018	Rp 6500	0,0%	Tetap
10/10/2018	Rp 6900	5,3%	Naik
01/04/2019	Rp 7650	10,9%	Naik

Sumber: Pertamina Indonesia, 2021

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan perkembangan harga BBM selama 9 tahun terakhir dari tahun 2011-2019, dimana kenaikan harga BBM tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 44,4 persen dari Rp 4.500/liter menjadi Rp 6.500/liter. Kenaikan harga BBM tersebut juga berdampak pada naiknya harga

komoditas lainnya yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya inflasi dorongan biaya (*cost push inflation*). Dari hal tersebut dapat diindikasikan bahwa tidak berpengaruhnya inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera disebabkan inflasi yang terjadi umumnya merupakan inflasi dari dorongan biaya (*cost push inflation*), sehingga inflasi tersebut tidak berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah permintaan tenaga kerja.

Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Singh (2018), Penelitian tersebut mengkaji dampak inflasi terhadap PDB dan tingkat pengangguran di India. Hasil analisis menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di India periode 2011-2018.

4. Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran di Pulau Sumatera

Berdasarkan hasil regresi *fixed effect model* menunjukkan variabel upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera. Setiap terjadi kenaikan upah minimum sebesar 1 persen maka tingkat pengangguran di Pulau Sumatera akan mengalami kenaikan sebesar 1,62 persen. Hasil ini sesuai dengan hipotesa dalam penelitian ini, di mana terdapat pengaruh positif antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Pulau Sumatera.

Secara umum, terjadinya kenaikan pada tingkat upah akan menyebabkan perusahaan mengurangi biaya produksi dengan cara melakukan pengurangan pada jumlah tenaga kerja yang digunakan atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagian pekerja/buruh demi menutupi besarnya biaya produksi yang

dikeluarkan. Ketika permintaan tenaga kerja turun akibat dari kenaikan upah tersebut, maka tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera akan mengalami kenaikan.

Secara umum, terjadinya kenaikan pada tingkat upah akan menyebabkan perusahaan mengurangi biaya produksi dengan cara melakukan pengurangan pada jumlah tenaga kerja yang digunakan atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sebagian pekerja/buruh, demi menutupi besarnya biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan. Ketika permintaan tenaga kerja turun akibat dari kenaikan upah tersebut, maka tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera akan mengalami kenaikan.

Secara nominal perkembangan upah minimum provinsi di Pulau Sumatera dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir terus mengalami kenaikan selama periode 2011-2019. Kenaikan UMP tertinggi di Pulau Sumatera terjadi pada tahun 2013 secara rata-rata sebesar 19,63 persen, dimana hal ini menyebabkan tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera mengalami kenaikan sebesar 5,82 persen. Hal ini dikarenakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang terlalu drastis dan tidak diikuti peningkatan produktivitas pekerja memukul daya saing perusahaan di Pulau Sumatera, terutama UKM dan perusahaan padat karya. Tentu saja hal ini merugikan dunia usaha dan memicu terjadinya gelombang PHK yang mengakibatkan naiknya tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Gorry, 2013), dalam hasil penelitiannya menemukan bahwa di mana Kenaikan upah minimum antara tahun 2007 dan 2009 di Prancis dapat menyebabkan peningkatan 0,8 persen tingkat pengangguran.

5. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran di Pulau Sumatera

Berdasarkan hasil regresi *fixed effect model* menunjukkan variabel tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera. Setiap terjadi kenaikan tingkat pendidikan sebesar 1 tahun maka akan mengurangi tingkat pengangguran di Pulau Sumatera sebesar 4,33 persen. Hasil ini sesuai dengan hipotesa dalam penelitian ini, di mana terdapat pengaruh negatif antara tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Pulau Sumatera.

Menurut McChonnell, dkk (2006) semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi juga produktivitas dari tenaga kerja yang dapat dihasilkan. Sehingga orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi mampu bersaing di dunia pasar tenaga kerja. Selain itu, ketika tenaga kerja berpendidikan beralih pekerjaan, mereka biasanya beralih tanpa mengalami periode pengangguran (Borjas, 2016). Dengan kata lain angkatan kerja di Pulau Sumatera yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan mudah bersaing dalam dunia pasar kerja, sehingga apabila angkatan kerja memiliki pendidikan semakin tinggi maka kemungkinan terjadinya pengangguran akan semakin kecil.

Selama kurun waktu sembilan tahun terakhir dari tahun 2011-2019 perkembangan tingkat pendidikan di Pulau Sumatera terus mengalami kenaikan. Menurut laporan Badan Pusat Statistik tingkat pendidikan di Pulau Sumatera selama periode 2011-2019 didominasi oleh angkatan kerja tamatan SMA sebanyak 6.843.661 orang atau sebesar 28,04 persen dan pada tahun 2019 naik menjadi 9.558.584 atau sebesar 33,96 persen. Sementara itu, untuk angkatan kerja

tamatan diploma /Perguruan tinggi pada tahun 2011 sebanyak 2.081.219 orang atau sebesar 8,53 persen dan pada tahun 2019 naik menjadi 3.667.712 atau sebesar 13,03 persen. Naiknya tingkat pendidikan di Pulau Sumatera akan berdampak pada meningkatnya kualitas SDM yang dimiliki, sehingga angkatan kerja yang memiliki kualitas yang baik akan mampu bersaing di dunia pasar kerja dan dapat mengurangi resiko terjadinya pengangguran. Hal ini juga dibuktikan dengan naiknya tingkat pendidikan di Pulau Sumatera yang berdampak pada turunnya tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera selama periode 2011-2019.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lavrinovich et al. (2015), dalam penelitiannya melihat pengaruh dari tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran dan pendapatan penduduk di Negara Latvia. Pada hasil penelitiannya menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Latvia, dimana setiap 1 tahun kenaikan tingkat pendidikan maka tingkat pengangguran akan turun sebesar 0,63 persen.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2011-2019, maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah dari empat variabel yang diteliti terdapat tiga variabel yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka, yaitu pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pendidikan. Sementara, variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera. Adapun pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera.
2. Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera.
3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan adapun saran dari penelitian ini, yaitu diharapkan kepada pemerintah provinsi di Pulau Sumatera untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Pulau Sumatera melalui pendidikan sehingga dengan adanya tingkat pendidikan tinggi dari angkatan kerja, maka kesempatan kerja yang dimiliki angkatan kerja juga akan semakin besar,

adanya kesempatan kerja yang semakin besar tersebut akan mendorong tingkat pengangguran semakin menurun dan nantinya mampu mengurangi masalah tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera.

Selain itu, diharapkan juga kepada pemerintah untuk terus menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera, sebab dengan adanya kualitas pertumbuhan ekonomi yang baik maka nantinya dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga akan meningkatkan daya serap tenaga kerja dan pada akhirnya dapat mengurangi masalah pengangguran yang terjadi di Pulau Sumatera. Selanjutnya, diharapkan kepada pemerintah untuk penetapan upah minimum provinsi harus lebih berhati-hati, sebab kenaikan upah minimum yang terlalu drastis tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja akan membebani bagi perusahaan yang memberi pekerjaan dan pada akhirnya akan mengurangi permintaan tenaga kerja sehingga akan berdampak pada naiknya tingkat pengangguran terbuka.

5.3 Keterbatasan Dan Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya

5.3.1 Keterbatasan Penelitian

1. Dalam penelitian hanya menggunakan empat variabel bebas, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum provinsi, dan tingkat pendidikan yang dijadikan sebagai faktor-faktor diduga mempengaruhi tingkat pengangguran di Pulau Sumatera. Sementara itu, mungkin ada beberapa variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.

2. Dalam penelitian ini Alat analisis yang digunakan hanya menggunakan satu alat analisis yaitu regresi data panel, dan tidak menambah alat analisis lainnya yang dapat memperkaya hasil dari penelitian.
3. Dalam penelitian ini data yang disajikan hanya bersumber data dari Badan Pusat Statistik Indonesia.
4. Dalam penelitian ini hanya menggunakan periode waktu sembilan tahun, sehingga mungkin hasil penelitian akan lebih akurat jika periode waktu yang digunakan lebih panjang.

5.3.2 Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya

1. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode analisis yang berbeda.
2. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran, seperti investasi, jumlah angkatan kerja, UMKM dan variabel lainnya
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan periode waktu yang lebih panjang sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Z. (2007). *Hukum Kerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badan pusat statistik. (2021). *Inflasi Gabungan 90 Kota Di Indonesia 2011-2019*. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi 2011-2019*. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Rata-rata Lama Sekolah Menurut Provinsi 2011-2019*. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi 2011-2019*. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) 2011-2019*. <https://www.bps.go.id>
- Borjas, G. J. (2008). *Labor Economics* (Fourth). New York: McGraw-Hill.
- Borjas, G. J. (2016). *Labor Economics* (Seventh). New York: McGraw-Hill.
- Chusna, A. (2013). Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, Dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 14–23.
- Ehrenberg, R. G., & Smith, R. S. (2012). *Modern Labor Economics: Theory and Public Policy*. *Modern Labor Economics: Theory and Public Policy* (Eleventh Edition). United States of America: Prentice hall.
- Gatiningsih, & Sutrisno, E. (2017). *Kependudukan Dan Ketenagakerjaan. Modul mata kuliah*. Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id>
- Gorry, A. (2013). Minimum wages and youth unemployment. *European Economic Review*, 64, 57–75.
- Kaufman, B. E., & Hotchkiss, J. L. (1999). *The Economic Of Labor Markets*. New York: Georgia State University.
- Khola Asif. (2013). Factors Effecting Unemployment : A Cross Country Analysis. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 3(1), 219–230.
- Latumaerissa, J. R. (2015). *Perekonomian Indonesia Dan Dinamika Ekonomi Global*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Lavrinovicha, I., Lavrinenko, O., & Teivans-Treinovskis, J. (2015). Influence of Education on Unemployment Rate and Incomes of Residents. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 174, 3824–3831.
- Macharia, M. K., & Otieno, A. (2015). Effect of Inflation on Unemployment In Kenya. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 6(6), 1980-1984.
- Mankiw, N. G. (2003). *Teori Ekonomi Makro* (Edisi Kelima). Jakarta: Erlangga.
- McConnell, C. R., Brue, S. L., & Macpherson, D. A. (2006). *Contemporary Labor Economics* (Seventh Edition). New York: McGraw-Hill.
- Misini, S., & Badivuku-Pantina, M. (2017). The Effect of Economic Growth in Relation to Unemployment. *Journal of Economics and Economic Education Research*, 18(2), 1–9.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan*. 2021. Jakarta: Kemenkumham.
- Pujoalwanto, B. (2014). *Perekonomian Indonesia; Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Puspadjuita, E. A. R. (2017). Factors that Influence the Rate of Unemployment in Indonesia. *International Journal of Economics and Finance*, 10(1), 140–147.
- Sadiku, M., Ibraimi, A., & Sadiku, L. (2015). Econometric Estimation of the Relationship between Unemployment Rate and Economic Growth of FYR of Macedonia. *Procedia Economics and Finance*, 19(15), 69–81.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (1992). *Makroekonomi*. (Y. Sumiharti, Ed.) (Fourteenth Edition). Jakarta: Erlangga.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (Nineteenth Edition). New York: McGraw-Hill.
- Singh, Rube. (2018). Impact of GDP and Inflation on Unemployment rate: "A Study of Indian Economy in 2011-2018". *International Journal of Management, IT & Engineering*, 8(3), 329-340.
- Soylu, Ö. B., Çakmak, İ., & Okur, F. (2018). Economic growth and unemployment issue: Panel data analysis in Eastern European Countries. *Journal of International Studies*, 11(1), 93–107.
- Reksohadiprodjo, Sukanto & A.R., Karseno.(2008). *Ekonomi perkotaan* (Edisi keempat). Yogyakarta: BPFE.
- Sukirno, S. (2010). *Makroekonomi Teori Pengantar* (Edisi Ketiga). Jakarta: Rajawali Pers.

Tukiran. (2014). *Kependudukan* (Edisi Pertama). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Wisnumurti, A. A. G. O., Darma, I. K., & Suasih, N. N. R. (2018). Government Policy of Indonesia to Managing Demographic Bonus and Creating Indonesia Gold in 2045. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 23(1), 23–34.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2006. Jakarta: Depdiknas.

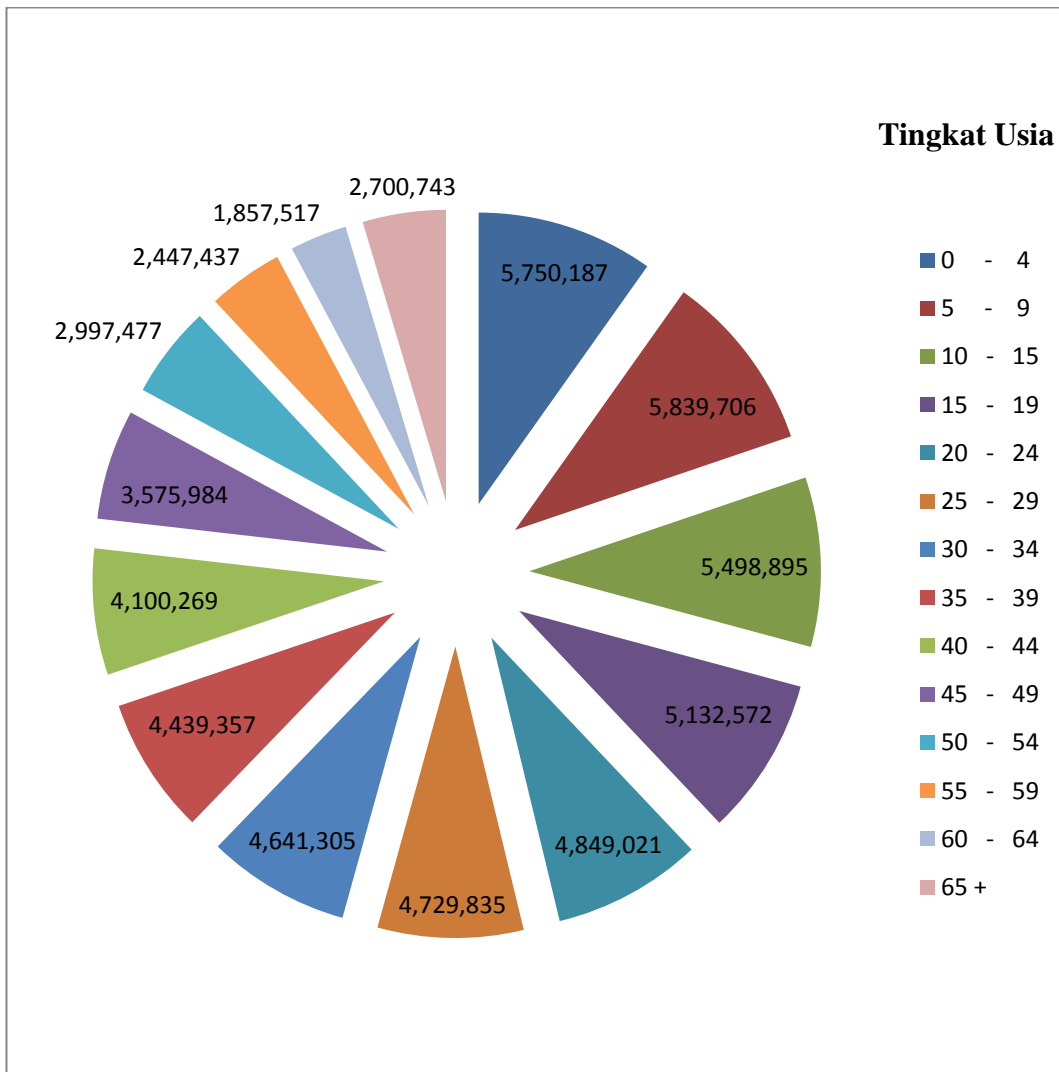
LAMPIRAN

Lampiran 1. Data uji regresi data panel 10 provinsi tahun 2011-2019

Provinsi	Tahun	TPT	PE	INF	LnUMP	TPD
Aceh	2011	9	3.28	3.32	14.1156	8.32
Aceh	2012	9.06	3.85	0.06	14.1520	8.36
Aceh	2013	10.12	2.61	6.39	14.2538	8.44
Aceh	2014	9.02	1.55	7.83	14.3751	8.71
Aceh	2015	9.93	-0.73	1.27	14.4574	8.77
Aceh	2016	7.57	3.29	3.13	14.5662	8.86
Aceh	2017	6.57	4.18	4.86	14.7318	8.98
Aceh	2018	6.34	4.61	1.93	14.8153	9.09
Aceh	2019	6.17	4.15	1.38	14.8926	9.18
Sumut	2011	8.18	6.66	3.54	13.8504	8.61
Sumut	2012	6.28	6.45	3.79	13.9978	8.72
Sumut	2013	6.45	6.07	10.09	14.1340	8.79
Sumut	2014	6.23	5.23	8.24	14.2249	8.93
Sumut	2015	6.71	5.1	3.32	14.3010	9.03
Sumut	2016	5.84	5.18	6.60	14.4099	9.12
Sumut	2017	5.6	5.12	3.18	14.4891	9.25
Sumut	2018	5.55	5.18	1.00	14.5727	9.34
Sumut	2019	5.39	5.22	2.46	14.6499	9.45
Sumbar	2011	8.02	6.34	5.37	13.8691	8.2
Sumbar	2012	6.65	6.31	4.16	13.9553	8.27
Sumbar	2013	7.02	6.08	10.87	14.1156	8.28
Sumbar	2014	6.5	5.88	11.90	14.2143	8.29
Sumbar	2015	6.89	5.53	0.85	14.2948	8.42
Sumbar	2016	5.09	5.27	5.02	14.4037	8.59
Sumbar	2017	5.58	5.3	2.11	14.4830	8.72
Sumbar	2018	5.66	5.16	2.55	14.5665	8.76
Sumbar	2019	5.38	5.05	1.73	14.6437	8.92
Riau	2011	6.09	5.57	5.09	13.9288	8.29
Riau	2012	4.37	3.76	3.35	14.0290	8.34
Riau	2013	5.48	2.48	8.83	14.1520	8.38
Riau	2014	6.56	2.71	8.53	14.3461	8.47
Riau	2015	7.83	0.22	2.71	14.4457	8.49
Riau	2016	7.43	2.18	4.19	14.5551	8.59
Riau	2017	6.22	2.66	4.07	14.6338	8.76
Riau	2018	5.98	2.37	2.54	14.7174	8.92
Riau	2019	5.76	2.84	2.56	14.7946	9.03
Jambi	2011	4.63	7.86	2.76	13.8431	7.48
Jambi	2012	3.2	7.03	4.22	13.9487	7.69
Jambi	2013	4.76	6.84	8.74	14.0779	7.8
Jambi	2014	5.08	7.36	8.72	14.2225	7.92
Jambi	2015	4.34	4.21	1.37	14.3520	7.96
Jambi	2016	4	4.37	4.54	14.4609	8.07
Jambi	2017	3.87	4.6	2.68	14.5397	8.15
Jambi	2018	3.73	4.74	3.02	14.6236	8.23

Jambi	2019	4.06	4.4	1.27	14.7009	8.45
Sumsel	2011	6.6	6.36	3.78	13.8628	7.42
Sumsel	2012	5.66	6.83	2.72	13.9938	7.5
Sumsel	2013	4.84	5.31	7.04	14.3041	7.53
Sumsel	2014	4.96	4.79	8.38	14.4171	7.66
Sumsel	2015	6.07	4.42	3.05	14.4957	7.77
Sumsel	2016	4.31	5.04	3.68	14.6067	7.83
Sumsel	2017	4.39	5.51	2.85	14.6860	7.99
Sumsel	2018	4.27	6.04	2.78	14.7695	8
Sumsel	2019	4.53	5.71	2.05	14.8467	8.18
Bengkulu	2011	3.46	6.85	3.96	13.6109	7.93
Bengkulu	2012	3.62	6.83	4.61	13.7429	8.01
Bengkulu	2013	4.61	6.07	9.94	13.9978	8.09
Bengkulu	2014	3.47	5.48	10.85	14.1156	8.28
Bengkulu	2015	4.91	5.13	3.25	14.2210	8.29
Bengkulu	2016	3.3	5.28	5.00	14.2886	8.37
Bengkulu	2017	3.74	4.98	3.56	14.3636	8.47
Bengkulu	2018	3.35	4.99	2.35	14.4514	8.61
Bengkulu	2019	3.26	4.96	2.88	14.5287	8.73
Lampung	2011	6.38	6.56	4.24	13.6589	7.28
Lampung	2012	5.2	6.44	4.30	13.7902	7.3
Lampung	2013	5.69	5.77	7.56	13.9553	7.32
Lampung	2014	4.79	5.08	8.36	14.1513	7.48
Lampung	2015	5.14	5.13	4.65	14.2736	7.56
Lampung	2016	4.62	5.14	2.75	14.3825	7.63
Lampung	2017	4.33	5.16	3.14	14.4618	7.79
Lampung	2018	4.04	5.25	2.92	14.5453	7.82
Lampung	2019	4.03	5.27	3.48	14.6226	7.92
Kepbabel	2011	3.86	6.9	5.00	13.8392	7.19
Kepbabel	2012	3.43	5.5	6.57	13.9199	7.25
Kepbabel	2013	3.65	5.2	8.71	14.0506	7.32
Kepbabel	2014	5.14	4.67	6.81	14.3102	7.35
Kepbabel	2015	6.29	4.08	4.66	14.5574	7.46
Kepbabel	2016	2.6	4.1	7.78	14.6663	7.62
Kepbabel	2017	3.78	4.47	2.66	14.7456	7.78
Kepbabel	2018	3.61	4.46	3.45	14.8291	7.84
Kepbabel	2019	3.58	3.32	2.32	14.9063	7.98
Kepri	2011	5.38	6.96	3.32	13.7902	9.46
Kepri	2012	5.08	7.63	3.92	13.8304	9.58
Kepri	2013	5.63	7.21	10.09	14.1267	9.63
Kepri	2014	6.69	6.6	7.49	14.3253	9.64
Kepri	2015	6.2	6.02	2.46	14.4854	9.65
Kepri	2016	7.69	4.98	3.06	14.5942	9.67
Kepri	2017	7.16	1.98	3.37	14.6735	9.79
Kepri	2018	8.04	4.58	2.36	14.7570	9.81
Kepri	2019	7.5	4.89	2.40	14.8343	9.99

Lampiran 2. Jumlah Penduduk Sumatera menurut kelompok umur



Lampiran 3. Uji Chow (*Chow Test*)

Redundant Fixed Effects Test

Pool : PLS

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	19.798	(9,76)	0.000
Cross-section Chi-square	108.660	9	0.000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: TPT?

Method: Panel Least Squares

Date: 07/02/21 Time: 00:05

Sample: 2011 2019

Included observations: 9

Cross-sections included: 10

Total pool (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	33.26028	7.617976	4.366026	0.0000
PE?	-0.572440	0.100512	-5.695246	0.0000
INF?	-0.015980	0.054063	-0.295590	0.7683
LnUMP?	-2.384465	0.526057	-4.532708	0.0000
TPD?	1.122274	0.203192	5.523227	0.0000

R-squared	0.428886	Mean dependent var	5.545222
Adjusted R-squared	0.402010	S.D. dependent var	1.626267
S.E. of regression	1.257590	Akaike info criterion	3.350223
Sum squared resid	134.4302	Schwarz criterion	3.489102
Log likelihood	-145.7601	Hannan-Quinn criter.	3.406227
F-statistic	15.95796	Durbin-Watson stat	0.728928
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 4. Uji Hausman (*Hausman Test*)

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: PLS

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	37.068443	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PE?	-0.348268	-0.505668	0.001280	0.0000
INF?	-0.045756	-0.001922	0.000068	0.0000
LnUMP?	1.621148	-1.880720	0.389983	0.0000
TPD?	-4.339471	0.091229	0.614703	0.0000

Lampiran 5. *Common Effect Model*

Dependent Variable: TPT?

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/02/21 Time: 00:02

Sample: 2011 2019

Included observations: 9

Cross-sections included: 10

Total pool (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	33.26028	7.617976	4.366026	0.0000
PE?	-0.572440	0.100512	-5.695246	0.0000
INF?	-0.015980	0.054063	-0.295590	0.7683
LnUMP?	-2.384465	0.526057	-4.532708	0.0000
TPD?	1.122274	0.203192	5.523227	0.0000
R-squared	0.428886	Mean dependent var		5.545222
Adjusted R-squared	0.402010	S.D. dependent var		1.626267
S.E. of regression	1.257590	Akaike info criterion		3.350223
Sum squared resid	134.4302	Schwarz criterion		3.489102
Log likelihood	-145.7601	Hannan-Quinn criter.		3.406227
F-statistic	15.95796	Durbin-Watson stat		0.728928
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 6. *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: TPT?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 07/02/21 Time: 00:25
 Sample: 2011 2019
 Included observations: 9
 Cross-sections included: 10
 Total pool (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.56010	5.618202	3.659552	0.0005
PE?	-0.348268	0.090757	-3.837388	0.0003
INF?	-0.045756	0.033073	-1.383460	0.1706
LnUMP?	1.621148	0.766793	2.114194	0.0378
TPD?	-4.339471	0.879211	-4.935640	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH--C	3.297431			
_SUMUT--C	3.846475			
_SUMBAR--C	1.653581			
_RIAU--C	0.714929			
_JAMBI--C	-2.795108			
_SUMSEL--C	-3.090038			
_BENGKULU--C	-1.498443			
_LAMPUNG--C	-3.701642			
_KEPBABEL--C	-5.369745			
_KEPRI--C	6.942560			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.829240	Mean dependent var	5.545222
Adjusted R-squared	0.800031	S.D. dependent var	1.626267
S.E. of regression	0.727233	Akaike info criterion	2.342894
Sum squared resid	40.19392	Schwarz criterion	2.731753
Log likelihood	-91.43024	Hannan-Quinn criter.	2.499705
F-statistic	28.38989	Durbin-Watson stat	1.814473
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 7. Random Effect Model

Dependent Variable: TPT?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 07/02/21 Time: 00:28

Sample: 2011 2019

Included observations: 9

Cross-sections included: 10

Total pool (balanced) observations: 90

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	34.27093	4.998836	6.855782	0.0000
PE?	-0.505668	0.083406	-6.062714	0.0000
INF?	-0.001922	0.032026	-0.060016	0.9523
LnUMP?	-1.880720	0.444958	-4.226733	0.0001
TPD?	0.091229	0.397881	0.229288	0.8192
Random Effects (Cross)				
_ACEH--C	1.749692			
_SUMUT--C	0.802451			
_SUMBAR--C	0.926746			
_RIAU--C	-0.351837			
_JAMBI--C	-0.936729			
_SUMSEL--C	0.065641			
_BENGKULU--C	-1.696924			
_LAMPUNG--C	-0.489227			
_KEPBABEL--C	-1.325995			
_KEPRI--C	1.256182			

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.882289	0.5955
Idiosyncratic random	0.727233	0.4045

Weighted Statistics

R-squared	0.280698	Mean dependent var	1.469120
Adjusted R-squared	0.246849	S.D. dependent var	0.987620
S.E. of regression	0.857099	Sum squared resid	62.44254
F-statistic	8.292548	Durbin-Watson stat	1.437820
Prob(F-statistic)	0.000011		

Unweighted Statistics

R-squared	0.240229	Mean dependent var	5.545222
Sum squared resid	178.8365	Durbin-Watson stat	0.502029